

a. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI									4.962.123,84	7.800.000,00	9.473.304,41	9.923.955,40	10.862.466,85	
		Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional.													Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi		Nilai 79,14	Nilai 79,54	Nilai 79,95	Nilai 80,36	Nilai 80,77						
		2	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPUPUM)		-	Nilai 67	Nilai 68	Nilai 69	Nilai 70						
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri													IPDN, BPSDM
		3	Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul		7 Prodi	8 Prodi	10 Prodi	11 Prodi	13 Prodi						
		4	Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN)		-	Nilai 39,71	Nilai 58,78	Nilai 78,95	Nilai 100						
		Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik													Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil)		Nilai 73	Nilai 77	Nilai 81	Nilai 85	Nilai 89						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas													Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, BSKDN
		6	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)		-	Nilai 61	Nilai 64	Nilai 67	Nilai 70						
		7	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK)		Nilai 60	Nilai 62,5	Nilai 65	Nilai 67,5	Nilai 70						
		8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)		Nilai 75	Nilai 77,5	Nilai 80	Nilai 82,5	Nilai 85						
		9	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)		-	Nilai 7	Nilai 8,5	Nilai 10	Nilai 11,5						
		10	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB)		Nilai 89,01	Nilai 90,01	Nilai 94,01	Nilai 98,01	Nilai 100,01						
		11	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti		50%	55%	60%	65%	70%						
		12	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Nilai 88	Nilai 89	Nilai 90	Nilai 91	Nilai 92						
		Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya													Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13	Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP)		-	Nilai 72	Nilai 74	Nilai 76	Nilai 85						
010. CM	PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH									488.310,17	852.731,52	1.232.858,62	1.536.785,93	1.869.171,25	
		Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar													Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		1	IKP 1: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana		Nilai 75	Nilai 77,5	Nilai 80	Nilai 82,5	Nilai 85						
		2	IKP 2: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		Nilai 75	Nilai 77,5	Nilai 80	Nilai 82,5	Nilai 85						
		3	IKP 3: Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat		Nilai 75	Nilai 77,5	Nilai 80	Nilai 82,5	Nilai 85						
		4	IKP 4: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		Nilai 75	Nilai 77,5	Nilai 80	Nilai 82,5	Nilai 85						
		Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara													Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKP 1: Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial		75%	77,50%	80%	82,50%	85%						
		2	IKP 2: Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan, Kawasan Khusus serta Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan		Nilai 45	Nilai 50	Nilai 55	Nilai 60	Nilai 65						
		3	IKP 3: Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu		81%	82%	83%	84%	85%						
		4	IKP 4: Indeks Kinerja Kecamatan		Nilai 45	Nilai 50	Nilai 55	Nilai 60	Nilai 65						
		5	IKP 5: Indeks Kinerja Kerjasama Daerah		-	Nilai 40	Nilai 45	Nilai 50	Nilai 55						
		6	IKP 6: Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		Nilai 63	Nilai 65,53	Nilai 70,27	Nilai 74	Nilai 78						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat													Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		1	IKP 1: Jumlah Provinsi dengan Indeks Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori "Sangat Baik"		-	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi						
		2	IKP 2: Indeks Penyelenggaraan DKTP		-	Nilai 40	Nilai 45	Nilai 50	Nilai 55						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa													Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		1	IKP 1: Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"		6076 Lembaga Desa	9.050 Lembaga Desa	9.700 Lembaga Desa	10.050 Lembaga Desa	10.500 Lembaga Desa						
		2	IKP 2: Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"		12.376 Desa	15.388 Desa	23.898 Desa	33.548 Desa	42.548 Desa						
		3	IKP 3: Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"		3.161 Orang	16.113 Orang	21.503 Orang	26.593 Orang	31.353 Orang						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional													Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		1	IKP 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		-	Nilai 56	Nilai 60	Nilai 65	Nilai 70						
		2	IKP 2: Jumlah daerah dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan nilai minimal 80 (Provinsi berkategori "Tuntas Paripurna" dan Kab/Kota berkategori minimal "Tuntas Madya")		157 Daerah	218 Daerah	-	-	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	IKP 3: Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna		-	-	20 Provinsi	27 Provinsi	34 Provinsi						
		4	IKP 4: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya		-	-	254 Kab/Kota	311 Kab/Kota	354 Kab/Kota						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, produk hukum daerah, dan penataan daerah													Ditjen Otonomi Daerah
		1	IKP 1: Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai 2,85	Nilai 3,02	Nilai 3,04	Nilai 3,06	Nilai 3,10						
		2	IKP 2: Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda		Nilai 70	Nilai 72	Nilai 75	Nilai 78	Nilai 80						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel													Ditjen Bina Keuangan Daerah
		1	IKP : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai 73	Nilai 75	Nilai 78	Nilai 81	Nilai 83						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas inovasi pemerintahan dalam negeri													BSKDN
		1	IKP: Indeks Inovasi Daerah		Nilai 46,5	Nilai 47	Nilai 47,5	Nilai 48	Nilai 48,5						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas strategi dan kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan pemerintahan dalam negeri													BSKDN
		1	IKP : Persentase rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri		70%	75%	80%	85%	90%						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah													BPSDM
		1	IKP 1: Persentase pengembangan kompetensi yang mengacu pada standarisasi kompetensi kerja		5%	28%	51%	75%	100%						
		2	IKP 2: Persentase aparatur yang meningkat kompetensinya melalui sertifikasi dan pengembangan kompetensi		15,25%	44,53%	62,17%	80,65%	100,00%						
1237	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah									121.200,00	60.572,86	323.632,69	529.155,96	734.591,56	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) sesuai ketentuan													
		1	IKK 1: Jumlah provinsi dengan nilai Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) meningkat		-	6 Provinsi	7 Provinsi	8 Provinsi	10 Provinsi						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang memiliki angka Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori "Sangat Baik"	Pusat	17 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	112.500,00	40.642,69	300.000,00	500.000,00	700.000,00	
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi pelaksanaan model ideal kewenangan dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.000,00	5.426,80	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		-	8 K/L	9 K/L	10 K/L	11 K/L						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomendasi atas usulan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga	Pusat	-	3 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	2.623,20	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		ABL. 002	Rincian Output: Rekomendasi isu aktual strategis nasional yang dilaksanakan dengan mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP)	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		ABL. 003	Rincian Output: Rekomendasi hasil penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian/Lembaga	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		Sasaran Kegiatan: Penyelenggaraan kecamatan, penyelenggaraan kerja sama daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu													
		1	IKK 1: Jumlah daerah yang menyelenggarakan kerja sama daerah		5 Provinsi (daerah)	17 Provinsi (daerah)	24 Provinsi (daerah)	31 Provinsi (daerah)	38 Provinsi (daerah)						
		UBA. 003	Rincian Output: Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Pusat	5 Provinsi	17 Provinsi	24 Provinsi	31 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		UBA. 004	Rincian Output: Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan	Pusat	1 Wilayah Metropoli tan	4 Wilayah Metropoli tan	6 Wilayah Metropoli tan	8 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	1.200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Jumlah regulasi bidang kerja sama daerah		-	-	-	1 Regulasi	1 Regulasi						
		AAC. 002	Rincian Output: Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kerjasama Daerah	Pusat	-	-	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	200,00	320,00	
		3	IKK 3: Jumlah kecamatan dengan Indeks Kinerja Kecamatan kategori "Baik"		2183 Kecamatan	2547 Kecamatan	2911 Kecamatan	3275 Kecamatan	3639 Kecamatan						
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	Pusat	40 Daerah Daerah (Kumulatif)	207 Daerah (Kumulatif)	314 Daerah (Kumulatif)	401 Daerah (Kumulatif)	508 Daerah (Kumulatif)	1.900,00	2.900,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
		UBA. 008	Rincian Output: Fasilitasi penguatan terhadap tata kelola koperasi merah putih kelurahan/desa	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.575,17	7.232,69	7.955,96	8.751,56	
		4	IKK 4: Jumlah regulasi bidang kecamatan		-	-		1 Regulasi	1 Regulasi						
		AAC. 001	Rincian Output: Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Pusat	-	-	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	200,00	320,00	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang menerapkan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)		38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	136 Daerah (Prov/Kab /Kota)	136 Daerah (Prov/Kab /Kota)	117 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	118 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Jumlah daerah yang mendukung penyelenggaraan kawasan khusus dan isu aktual strategis kewilayahan		8 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 003	Rincian Output: Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan khusus di daerah	Pusat	8 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	1.136,29	-	-	-	-	
		FBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi daerah mitra dengan otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)	Pusat	4 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	
		AFA. 001	Rincian Output: Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang kawasan khusus	Pusat	2 NSPK	-	-	-	-	660,00	-	-	-	-	
		UBA. 005	Rincian Output: Penataan kewilayahan kawasan perbatasan dan wilayah metropolitan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	2.600,00	2.810,00	3.031,00	
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan bidang standar pelayanan perkotaan	Pusat	1 Rekomen dasi	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	
		ABL. 004	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas	Pusat	1 Rekomen dasi	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	
		UBA. 004	Rincian Output: Penataan kewilayahan dalam Negeri dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 006	Rincian Output: Fasilitasi Administrasi kewilayahan dalam rangka implementasi kegiatan 3 juta rumah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.200,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah regulasi bidang perkotaan		-	-	-	1 Regulasi	1 Regulasi						
		AAC. 001	Rincian Output: Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan	Pusat	-	-	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	200,00	320,00	
		3	IKK 3: Jumlah daerah yang ditangani masalah dan konflik pertanahan di daerah		25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 001	Rincian Output: Penanganan konflik pertanahan di daerah	Pusat	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.500,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	
		4	IKK 4: Jumlah wilayah metropolitan dengan Indeks Maturasi Perkotaan berkategori "Baik"		3 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas Kementerian/Lembaga secara terpadu di wilayah metropolitan	Pusat	3 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	1.000,00	2.750,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang dikuatkan tata kelola <i>smart city</i> -nya di wilayah metropolitan	Pusat	3 Wilayah Metropiltan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	1.500,00	3.000,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 003	Rincian Output: Daerah yang dimediasi dan di advokasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) perkotaan pada wilayah metropolitan	Pusat	3 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropolitan	10 Wilayah Metropolitan	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
		5	IKK 5: Jumlah segmen batas daerah yang ditegaskan		5 Segmen	55 Segmen (kumulatif)	55 Segmen (kumulatif)	55 Segmen (kumulatif)	55 Segmen (kumulatif)						
		PEC. 003	Rincian Output: Kementerian/lembaga yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau	Pusat	12 Kesepaka tan	16 Kesepaka tan (Akumu lasi)	20 Kesepaka tan (Akumu lasi)	24 Kesepaka tan (Akumu lasi)	30 Kesepaka tan (Akumu lasi)	2.400,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
		FAB. 001	Rincian Output: Sistem informasi pemerintahan bidang administrasi kewilayahan dalam mendukung satu data indonesia - bidang kewilayahaan	Pusat	1 Sistem	-	-	-	-	740,00	-	-	-	-	
		PBL. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	Pusat	5 Rekomen dasi Kebijakan	50 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	1.000,00	6.000,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	
		PBL. 002	Rincian Output: Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi	Pusat	-	9 Rekomen dasi Kebijakan	9 Rekomen dasi Kebijakan	9 Rekomen dasi Kebijakan	10 Rekomen dasi Kebijakan	-	3.000,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	
		FBA. 004	Rincian Output: Fasilitasi Kegiatan Strategis Program Percepatan Direktif Presiden	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	25.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6	IKK 6: Jumlah kesepakatan kerja sama pembangunan lintas batas negara dan penyelesaian permasalahan batas negara		3 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan	5 Kesepaka tan						
		BGE. 001	Rincian Output: Pembentukan lembaga sekretariat forum pelaksanaan kerjasama/ perundingan bilateral wilayah perbatasan negara	Pusat	1 Lembaga	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	
		PEC. 001	Rincian Output: Penguatan kerja sama pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	Pusat	1 Kesepaka tan/Hasil Perundi ngan	2 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	2 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	2 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	2 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	2.000,00	11.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	
		PEC. 002	Rincian Output: Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharaan batas negara	Pusat	2 Kesepaka tan /Hasil Perundi ngan	3 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	3 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	3 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	3 Kesepaka tan/Hasil perundi ngan	1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	
1244	Kegiatan: Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa									26.633,31	82.839,38	143.889,38	134.804,53	127.320,66	Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuagand dan Aset Pemerintahan Desa, Direktorat Fasilitasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawa tan Desa, Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakata n dan Adat Desa, PKK dan Posyandu; Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa; Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sistem pelayanan administrasi desa dalam tata kelola pemerintahan desa													
		1	IKK 1: Jumlah desa yang tertib administrasi, batas wilayah dan penataan desa		517 Desa	1950 Desa	2100 Desa	1625 Desa	1450 Desa						
		FBB. 001	Rincian Output: Desa yang telah dievaluasi data nama dan kode desa dalam rangka tertib administrasi kode wilayah	Pusat	15 Desa	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBB. 002	Rincian Output: Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	Pusat	30 Desa	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	
		UBB. .007	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Pusat	-	-	150 Desa	175 Desa	200 Desa	-	-	6.500,00	8.000,00	10.000,00	
		FBB. 003	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam rangka evaluasi penataan desa	Pusat	15 Desa	450 Desa	450 Desa	450 Desa	450 Desa	145,12	500,00	300,00	350,00	400,00	
		UBB. 009	Rincian Output: Desa yang telah memiliki peta batas desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Peta Batas Desa	Pusat	457 Desa	1500 Desa	1500 Desa	1000 Desa	800 Desa	15.309,35	33.440,00	48.640,00	33.440,00	21.170,66	
		2	IKK 2: Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa		165 Desa	6132 Desa	6150 Desa	6200 Desa	6250 Desa						
		FBB. 004	Rincian Output: Desa yang menerapkan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	Pusat	40 Desa	5132 Desa	5150 Desa	5200 Desa	5250 Desa	477,33	1.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	
		UBB. 006	Rincian Output: Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	Pusat	125 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1.000,00	2.000,00	6.600,00	7.400,00	8.200,00	
		3	IKK 3 : Jumlah desa yang menetapkan kewenangan desa dan produk hukum desa		70 Desa	500 Desa	650 Desa	675 Desa	700 Desa						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBB. 006	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam penetapan kewenangan desa	Pusat	15 Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	104,88	750,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		FBB. 007	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	Pusat	20 Desa	-	150 Desa	175 Desa	200 Desa	155,12	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		4	IKK 4 : Jumlah desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional		40 Desa	500 Desa	550 Desa	600 Desa	650 Desa						
		FBB. 008	Rincian Output: Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	Pusat	40 Desa	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	
		UBB. 008	Rincian Output: Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	Pusat	-	500 Desa	550 Desa	600 Desa	650 Desa	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	
		5	IKK 5 : Jumlah desa dengan status kategori "Cepat Berkembang"		4.500 Desa	5.000 Desa	10.000 Desa	15.000 Desa	20.000 Desa						
		FBB. 009	Rincian Output: Desa dengan status kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"	Pusat	10.000 Desa	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	
		FBB. 010	Rincian Output: Desa dengan status kategori "Cepat Berkembang"	Pusat	-	5.000 Desa	10.000 Desa	15.000 Desa	20.000 Desa	-	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBB. 011	Rincian Output: Desa yang mempublikasikan inovasi dan keunggulan desa	Pusat	-	500 Desa	500 Desa	500 Desa	500 Desa	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomendasi penguatan teknis perkembangan kemajuan desa terhadap isu strategis aktual	Pusat	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	500,00	500,00	600,00	850,00	700,00	
		FBB. 014	Rincian Output: Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penerapan <i>smart village</i>	Pusat	-	868 Desa	868 Desa	868 Desa	868 Desa	-	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
		6	IKK 6: Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa		90 Desa	600 Desa	800 Desa	800 Desa	800 Desa						
		UBB. 001	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	Pusat	90 Desa	600 Desa	800 Desa	800 Desa	800 Desa	850,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang melaporkan kerja sama desa	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	
		7	IKK 7 : Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital		150 Desa	21.000 Desa	2.500 Desa	3.000 Desa	3.500 Desa						
		UBB. 002	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	Pusat	50 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	1.500 Desa	1.500 Desa	850,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		UBB. 003	Rincian Output: Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Pusat	100 Desa	20.000 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	2.000 Desa	850,00	6.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		8	IKK 8: Jumlah desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Profil Desa dan Kelurahan/Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Prodeskel/Epdeskel) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		500 Desa	20.000 Desa	5.000 Desa	10.000 Desa	15.000 Desa						
		UAB. 001	Rincian Output: Sistem informasi desa berbasis Profil Desa dan Kelurahan/Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Prodeskel/Epdeskel) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Pusat	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	
		UBB. 005	Rincian Output: Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Profil Desa dan Kelurahan/Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Prodeskel/Epdeskel) dalam Perencanaan dan Pelaporan	Pusat	-	20.000 Desa	5.000 Desa	10.000 Desa	15.000 Desa	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		FBB. 012	Rincian Output: Desa dan kelurahan yang melakukan pemutakhiran data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)	Pusat	500 Desa/Kel	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9	IKK 9 : Jumlah desa yang menerapkan digitalisasi dalam peningkatan kapasitas aparatur/ pengurus kelembagaan desa		100 Desa	-	-	-	-						
		UBB. 004	Rincian Output: Desa yang memanfaatkan Learning Management System (LMS) dalam pembelajaran digital dalam peningkatan kapasitas aparatur/ pengurus kelembagaan desa	Pusat	100 Desa	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	
		10	IKK 10 : Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		1.500 Desa	2.100 Desa	1.250 Desa	1.100 Desa	-						
		UBB. 010	Rincian Output: Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Pusat	1.500 Desa	2.100 Desa	1.250 Desa	1.100 Desa	-	1.961,52	2.149,38	1.799,38	1.664,53	-	
		11	IKK 11: Jumlah desa dengan Nilai Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"		-	3.500 Desa	1.200 Desa	1.250 Desa	1.300 Desa						
		FBB. 013	Rincian Output: Desa dengan nilai Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa kategori Nilai "Baik"	Pusat	-	3.500 Desa	1.200 Desa	1.250 Desa	1.300 Desa	-	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		12	IKK 12 : Jumlah desa yang mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih		-	1.552 Desa	2.000 Desa	2.500 Desa	3.000 Desa						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBB. 011	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih	Pusat	-	1.552 Desa	2.000 Desa	2.500 Desa	3.000 Desa	-	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
		UBB. 012	Rincian Output: Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama koperasi desa/kelurahan merah putih	Pusat	-	5.000 Desa	5.500 Desa	6.000 Desa	6.500 Desa	-	1.000,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
1248	Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa									14.300,00	44.730,40	47.406,24	48.856,24	47.428,24	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa; Balai Pemerintahan Desa
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas aparatur/pengurus kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan													
		1	IKK 1: Jumlah kebijakan/ pedoman/ modul bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa		1 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK						
		AFA. 001	Rincian Output: Kebijakan/Pedoman/ Modul bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa	Pusat	1 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	150,00	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		2	IKK 2 : Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa yang kompeten dalam manajemen pemdes		3.060 Orang	5.760 Orang	6.000 Orang	6.090 Orang	5.850 Orang						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Persentase kesesuaian perencanaan, tindak lanjut, evaluasi, implementasi dan pemanfaatan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah		50%	56%	60%	65%	70%						
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomendasi hasil fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat	-	38 Rekomend asi kebijakan	38 Rekomend asi kebijakan	38 Rekomenda si kebijakan	38 Rekomenda si kebijakan	-	1.700,00	2.100,00	2.800,00	3.500,00	
		ABL. 002	Rincian Output: Rekomendasi keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pusat	-	4 Rekomend asi kebijakan	4 Rekomend asi kebijakan	4 Rekomenda si kebijakan	4 Rekomenda si kebijakan	-	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat	Pusat	-	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 003	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam Evaluasi Manajemen Risiko dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	
		UAB. 001	Rincian Output: Optimalisasi penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	Pusat	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	4.600,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah regulasi bidang pembangunan daerah		2 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi						
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		AAG. 002	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	
1259	Kegiatan: Fasilitas Penataan Daerah, Otonomi Khusus/Istimewa									9.000,00	19.740,00	33.770,00	36.500,00	42.000,00	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Pertimbangan Otonomi Daerah
		Sasaran Kegiatan: Menguatnya kapasitas penataan daerah dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan Otsus/Istimewa dan DPOD													
		1	IKK 1: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penataan daerah, dan Otonomi Khusus (Otsus)/istimewa		4 Rekomen dasi Kebijakan	9 Rekomen dasi Kebijakan	23 Rekomen dasi Kebijakan	22 Rekomen dasi Kebijakan	22 Rekomen dasi Kebijakan						
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomedasi kebijakan penataan daerah	Pusat	-	-	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
		ABL. 003	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan daerah Otonomi Khusus (Otsus)/istimewa	Pusat	-	-	10 Rekomen dasi Kebijakan	10 Rekomen dasi Kebijakan	10 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	6.000,00	8.000,00	10.000,00	
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan penyelesaian sengketa di Daerah Otonom Baru (DOB)	Pusat	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
		PBL. 002	Rincian Output: Rekomendasi model ideal penataan daerah dalam rangka revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.000,00	1.250,00	-	-	
		PBL. 003	Rincian Output: Rekomedasi kebijakan terkait Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	Pusat	-	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	-	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Jumlah daerah yang meningkat kinerjanya dalam penyelenggaraan otonomi khusus/istimewa		5 Daerah	6 Daerah	7 Daerah	8 Daerah	10 Daerah						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kinerja daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	6.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	
		3	IKK 3: Jumlah regulasi bidang penataan daerah		-	2 Regulasi	1 Regulasi	-	-						
		PAC. 001	Rincian Output: Rancangan peraturan pemerintah mengenai kawasan aglomerasi	Pusat	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	520,00	520,00	-	-	
		AAD. 001	Rincian Output: Rancangan peraturan presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi dan tata cara penunjukan Dewan Kawasan Aglomerasi	Pusat	-	1 Rperpres	-	-	-	-	220,00	-	-	-	
1261	Kegiatan: Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									3.800,00	8.689,29	7.056,05	7.631,05	8.119,05	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi bidang peningkatan kapasitas pemerintahan daerah		1 Regulasi	-	-	-	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tindak lanjut peraturan presiden pengembangan kapasitas pemerintah daerah	Pusat	1 Permen	-	-	-	-	84,30	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah daerah dengan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berkategori "Tinggi"		35 Daerah	71 Daerah	87 Daerah	103 Daerah	119 Daerah						
		FAB. 001	Rincian Output: Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Pusat	1 Sistem Informasi	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	709,90	-	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
		UBA. 001	Rincian Output: Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Pusat	5 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	12 Daerah (Prov/Kab /Kota)	13 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.478,27	6.433,680	3.122,05	3.122,55	3.123,05	
		UBA. 002	Rincian Output: Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Pusat	30 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	60 Daerah (Prov/Kab /Kota)	75 Daerah (Prov/Kab /Kota)	90 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	105 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	251,99	1.255,608	753,00	753,50	754,00	
		3	IKK 3: Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disusun		2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)		82 Daerah	98 Daerah	115 Daerah	131 Daerah	147 Daerah						
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat	530 Daerah	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.690,00	2.250,00	4.500,00	6.700,00	6.800,00	
		2	IKK 2: Jumlah daerah yang menerapkan inovasi tematik berdasarkan isu aktual strategis		2 Wilayah Metropoli tan	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan pilot project inovasi tematik	Pusat	2 Wilayah Metropoli tan	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.500,00	2.000,00	5.500,00	7.700,00	7.800,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Optimalisasi Difusi Inovasi Dalam Pengendalian Inflasi pada Pemerintah Daerah	Pusat	38 Provinsi	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	
1285	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi									2.339,80	24.560,63	25.333,00	28.283,00	31.133,00	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas standarisasi dan sertifikasi aparatur pemerintahan dalam negeri													
		1	IKK 1: Jumlah standarisasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan Dalam Negeri		6 Naskah	27 Naskah	26 Naskah	28 Naskah	29 Naskah						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AFA. 001	Rincian Output: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) standarisasi dan sertifikasi	Pusat	6 NSPK	8 NSPK	7 NSPK	8 NSPK	9 NSPK	600,00	800,00	700,00	800,00	900,00	
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri berdasarkan kapasitas daerah bidang sumber daya manusia aparatur	Pusat	-	8 Rekomen dasi Kebijakan	11 Rekomen dasi Kebijakan	11 Rekomen dasi Kebijakan	8 Rekomen dasi Kebijakan	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		PFA. 001	Rincian Output: Standarisasi perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri	Pusat	-	19 NSPK	19 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	-	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah aparatur pemerintahan dalam negeri yang tersertifikasi		450 Orang	1770 Orang	700 Orang	720 Orang	750 Orang						
		ADI. 002	Rincian Output: Sertifikasi jabatan aparatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah	Pusat	450 Orang	1770 Orang	700 Orang	720 Orang	750 Orang	1.625,62	2.547,25	950,00	1.150,00	1.300,00	
		3	IKK 3: Jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi		15 Lembaga	15 Lembaga	17 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BDB. 001	Rincian Output: Lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri	Pusat, Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukittinggi) , Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogya karta (DIY) (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	15 Lembaga	15 Lembaga	17 Lembaga	18 Lembaga	20 Lembaga	114,18	280,00	250,00	300,00	400,00	
		4	IKK 4: Jumlah provinsi dengan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri meningkat		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 001	Rincian Output: Penilaian indeks kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 101	Rincian Output: Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden Pertumbuhan Ekonomi	Pusat, Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukittinggi) , Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar	-	1800 Orang	2100 Orang	2400 Orang	2700 Orang	-	15.033,38	17.533,00	20.033,00	22.533,00	
3991	Kegiatan: Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa									5.000,00	15.500,00	16.500,00	13.000,00	14.500,00	Direktorat Produk Hukum Daerah
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas produk hukum daerah													
		1.	IKK 1: Jumlah daerah dengan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda dengan kategori "Sangat Baik"		10 Provinsi	17 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi						
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	

[illegible]

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Jumlah Daerah yang dibina kapasitasnya guna menunjang mutu layanan standar pelayanan minimal (SPM) trantibumlinmas sub urusan trantibum		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						
		UBA. 003	Rincian Output: Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan trantibum berdasarkan tipologi daerah	Pusat	273 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	7.750,00	22.936,78	24.630,00	35.993,00	51.892,30	
		AFA. 002	Rincian Output: NSPK di bidang trantibumlinmas sub urusan trantibum	Pusat	1 NSPK	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	
		AAH. 001	Rincian Output: Revisi kepmendagri tentang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Pusat	1 Peraturan	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
		AAH. 002	Rincian Output: Kepmendagri mengenai trantibumlinmas	Pusat	2 Peraturan	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah regulasi bidang trantibumlinmas sub urusan trantibum		-	-	1 Regulasi	3 Regulasi	1 Regulasi						
		AAC. 001	Rincian Output: Revisi Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Pusat	-	-	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	200,00	320,00	
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Pusat	-	-	-	2 PerMen	-	-	-	-	400,00	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AAG. 003	Rincian Output: Peraturan Menteri Pedoman Pemberian Penghargaan Trantibumlinmas	Pusat	-	-	1 PerMen	-	-	-	-	200,00	-	-	
		3	IKK 3: Jumlah Daerah yang dibina kapasitasnya guna menunjang mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) trantibumlinmas sub urusan bencana		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana berdasarkan tipologi daerah	Pusat	273 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	3.200,00	10.000,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30	
		UBA. 004	Rincian Output: Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Pusat	3 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 005	Rincian Output: Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	Pusat	3 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		4	IKK 4: Jumlah daerah yang dibina kapasitasnya guna menunjang mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) trantibumlinmas sub urusan kebakaran		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran berdasarkan tipologi daerah	Pusat	273 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	3.000,00	54.550,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30	
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat		30 Daerah (Kab/Kota)	40 Daerah (Kab/Kota)	50 Daerah (Kab/Kota)	60 Daerah (Kab/Kota)	70 Daerah (Kab/Kota)						
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	300,00	3.415,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		UAB. 001	Rincian Output: Sistem informasi pemerintahan bidang administrasi kewilayahan dalam mendukung satu data indonesia – bidang trantibumlinmas	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6138	Kegiatan: Penataan Kelembagaan Desa									8.617,55	31.000,00	30.250,00	35.750,00	41.950,00	Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; Direktorat Fasilitasi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawa tan Desa; Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarak atan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya fungsi kelembagaan desa													
		1	IKK 1 : Jumlah kebijakan terkait Trantibumlinmas Desa		1 NSPK	-	-	-	-						
		AFA. 001	Rincian Output: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat desa	Pusat	1 NSPK	-	-	-	-	225,00	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah lembaga desa yang tertata		4.550 Lembaga	5.250 Lembaga	5.400 Lembaga	5.400 Lembaga	5.500 Lembaga						
		BDB. 001	Rincian Output: Fasilitasi pembentukan dan penataan lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Pusat	-	-	450 Lembaga	450 Lembaga	500 Lembaga	-	-	1.050,00	1.050,00	1.150,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BDB. 002	Rincian Output: Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang Tertata	Pusat	4.500 Lembaga PKK	5.000 Lembaga PKK	4.500 Lembaga PKK	4.500 Lembaga PKK	4.500 Lembaga PKK	5.000,00	15.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
		BDB. 003	Rincian Output: Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa (LKAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Tertata dan Berdaya	Pusat	50 Lembaga	250 Lembaga	450 Lembaga	450 Lembaga	500 Lembaga	225,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
		3	IKK 3: Jumlah Lembaga Posyandu yang melaksanakan Tugas Berdasarkan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1.500 Lembaga	9.500 Lembaga	2.000 Lembaga	2.250 Lembaga	2.500 Lembaga						
		QDB. 001	Rincian Output: Fasilitasi lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Pelaksanaan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	1.500 Lembaga	9.500 Lembaga	2.000 Lembaga	2.250 Lembaga	2.500 Lembaga	2.500,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
		4	IKK 4 : Jumlah BPD yang Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Berkategori "Baik"		15 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga						
		FAI. 001	Rincian Output: Fasilitasi implementasi tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	Pusat	15 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga	1.000 Lembaga	150,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		5	IKK 5: Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa		-	-	300 Lembaga	400 Lembaga	500 Lembaga						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BEI. 002	Rincian Output: Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Pusat	10 Lembaga	-	300 Lembaga	400 Lembaga	500 Lembaga	517,55	-	16.000,00	21.000,00	26.000,00	
6139	Kegiatan: Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah									112.544,05	143.150,00	188.150,00	234.950,00	282.850,00	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I, II, III, IV Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah													
		1	IKK 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		22 Rekomen dasi	24 Rekomen dasi	-	-	-						
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib pelayanan dasar	Pusat	6 Rekomen dasi	6 Rekomen dasi	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	-	-	
		PBL. 002	Rincian Output: Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib non-pelayanan dasar	Pusat	8 Rekomen dasi	10 Rekomen dasi	-	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-	
		PBL. 003	Rincian Output: Rekomendasi ketepatan pembagian urusan pilihan	Pusat	8 Rekomen dasi	8 Rekomen dasi	-	-	-	5.600,00	3.200,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Jumlah daerah yang meningkat Indeks Penerapan SPM-nya		30 Daerah	50 Daerah	-	-	-						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah yang melaksanakan peningkatan mutu dan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.000,00	5.700,00	-	-	-	
		UBA. 002	Rincian Output: Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	1.250,00	1.000,00	-	-	-	
		UBA. 200	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	
		UBA. 201	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	
		UBA. 300	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab / Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	
		UBA. 301	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab / Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			berdasarkan Tipologi Daerah												
		UBA. 302	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab / Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	
		UBA. 400	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab / Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	
		3	IKK 3: Jumlah Provinsi yang meningkat Indeks Penerapan SPM-nya		-	-	25 Provinsi	30 Provinsi	38 Provinsi						
		UBA. 006	Rincian Output: Provinsi yang melaksanakan peningkatan mutu dan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
		UBA. 007	Rincian Output: Provinsi yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	2.250,00	2.750,00	3.250,00	
		UBA. 206	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 207	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 306	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 307	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 308	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 411	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		4	IKK 4: Jumlah Kabupaten/Kota yang meningkat Indeks Penerapan SPM-nya		-	-	300 Kab/Kota	400 Kab/Kota	508 Kab/Kota						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 208	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 209	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 309	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 310	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 311	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		UBA. 412	Rincian Output: Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan	Pusat	-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)		-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Minimal (SPM) urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah												
		5	IKK 5: Persentase kesesuaian perencanaan dan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam lingkup pembangunan daerah		-	56%	60%	65%	70%						
		ABL. 100	Rincian Output: Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintah daerah I (Bidang pertanahan, penataan ruang, pangan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan pertanian)	Pusat	-	7 Rekomen dasi Kebijakan	7 Rekomen dasi Kebijakan	7 Rekomend asi Kebijakan	7 Rekomend asi Kebijakan		1.750,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	
		ABL. 200	Rincian Output: Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah II (Bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perhubungan, dan kelautan dan perikanan)	Pusat	-	7 Rekomen dasi Kebijakan	7 Rekomen dasi Kebijakan	7 Rekomend asi Kebijakan	7 Rekomend asi Kebijakan		1.750,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	
		ABL. 300	Rincian Output: Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah III (Bidang ketenteraman, ketertiban	Pusat	-	11 Rekomen dasi Kebijakan	11 Rekomen dasi Kebijakan	11 Rekomen dasi Kebijakan	11 Rekomen dasi Kebijakan		2.750,00	22.000,00	27.500,00	33.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			umum, dan perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas), Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (admidukcapil), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), Penanaman Modal, Kebudayaan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian)												
		ABL. 400	Rincian Output: Rekomendasi Hasil Fasilitasi perencanaan urusan pemerintah daerah IV (bidang Pendidikan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (dalduk kb), Pemuda dan olahraga (pora), Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Tenaga Kerja, Transmigrasi)	Pusat	-	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan		2.000,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00	
		6	IKK 6: Persentase pelaksanaan isu strategis aktual bidang pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		FBA. 100	Rincian Output: Fasilitasi Integrasi Perubahan Iklim ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Pusat	-	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)		200,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 101	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan reforma agraria dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	600,00	200,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	
		FBA. 102	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penguatan ketahanan pangan daerah	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	500,00	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 103	Rincian Output: Daerah yang melaksanakan program kelapa sawit berkelanjutan	Pusat	26 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	29 Daerah (Prov/Kab /Kota)	29 Daerah (Prov/Kab /Kota)	29 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	29 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	500,00	200,00	1.700,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 104	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan perhutanan sosial	Pusat	24 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	27 Daerah (Prov/Kab /Kota)	30 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	37 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200,00	500,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00	
		FBA. 105	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan dan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200,00	200,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00	
		FBA. 106	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Pusat	-	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	13 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	750,00	1.000,00	1.250,00	
		FBA. 107	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan transisi Energi	Pusat	-	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	750,00	1.000,00	1.250,00	
		FBA. 200	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan potensi dan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan	Pusat	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200,00	200,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 201	Rincian Output: Daerah yang terfasilitasi kerjasama bidang pengawasan kelautan dan perikanan	Pusat	-	5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	750,00	1.250,00	1.750,00	
		FBA. 202	Rincian Output: Provinsi yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) lingkup urusan kelautan dan perikanan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	750,00	1.250,00	1.750,00	
		FBA. 203	Rincian Output: Provinsi yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (RenstraPD/ RenjaPD) lingkup urusan kelautan dan perikanan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
		FBA. 204	Rincian Output: Daerah yang kapasitas kelembagaan pengelolanya meningkat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	Pusat	-	5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 205	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi pemetaan potensi pengembangan ekonomi biru	Pusat	-	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 206	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Inpres Irigasi	Pusat	-	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 207	Rincian Output: Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kawasan Pusat Pemerintahan 4 DOB Papua	Pusat	-	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 208	Rincian Output: Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim sektor air pada wilayah rentan kekeringan	Pusat	-	-	20 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.700,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 209	Rincian Output: Daerah yang sudah mengintegrasikan pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi dengan portal layanan daerah	Pusat	-	-	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	750,00	1.250,00	1.750,00	
		FBA. 210	Rincian Output: Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	Pusat	-	-	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	750,00	1.250,00	1.750,00	
		FBA. 211	Rincian Output: Daerah yang menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Pusat	-	-	7 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	750,00	1.250,00	1.750,00	
		FBA. 212	Rincian Output: Daerah yang menyusun Perda terkait tata kelola air limbah domestik	Pusat	-	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 213	Rincian Output: Daerah yang meningkat kinerja air minum di tingkat kab/kota	Pusat	-	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 214	Rincian Output: Daerah yang meningkat kinerja sanitasi (air limbah domestik) di tingkat kab/kota	Pusat	-	-	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 300	Rincian Output: Daerah yang di fasilitasi dalam peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pusat	514 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	514 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	514 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	514 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	514 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		FBA. 301	Rincian Output: Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	300,00	6.000,00	1.300,00	1.800,00	2.200,00	
		FBA. 302	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan pelayanan kesehatan daerah	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200,00	200,00	700,00	1.000,00	1.200,00	
		FBA. 303	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pembentukan koperasi merah putih	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
		FBA. 304	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokrenda	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
		FBA. 305	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pengendalian penyakit dan Peningkatan Kesehatan	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
		FBA. 400	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan	Pusat	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	650,00	1.000,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			ketenagakerjaan												
		FBA. 401	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan transmigrasi	Pusat	4 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4 Daerah (Prov/Kab /Kota)	4 Daerah (Prov/Kab /Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200,00	200,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00	
		FBA. 402	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelarasan, integrasi dan penerapan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan kearsipan	Pusat	-	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 403	Rincian Output: Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI)	Pusat	-	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	200,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 404	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan sekolah rakyat	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 405	Rincian Output: Daerah yang di Fasilitasi dalam Pengembangan Budaya Tertib Arsip	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	274,48	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		FBA. 800	Rincian Output: Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	30.473,28	-	-	-	-	
		FBA. 801	Rincian Output: Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir	Pusat	6 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	7.615,30	15.192,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Perkotaan (NUFReP)												
		FBA. 802	Rincian Output: Fasilitasi perencanaan dan pengendalian serta perlindungan risiko bencana di kawasan pertanian	Pusat	16 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	16 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	13.555,47	9.731,40	-	-	-	
		FBA. 803	Rincian Output: Fasilitasi peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam implementasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Daerah melalui program <i>Investing in Nutrition and Early Years</i> (INEY) Phase II	Pusat	-	100 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	-	45.202,12	-	-	-	
		UBA. 003	Rincian Output: Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 004	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 005	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	
		UBA. 100	Rincian Output: Daerah yang dievaluasi rancangan Perda tata ruangnya	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	43 Daerah (Prov/Kab /Kota)	45 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	48 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 101	Rincian Output: Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	650,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 202	Rincian Output: Daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Pusat	6 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	9 Daerah (Prov/Kab /Kota)	9 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 203	Rincian Output: Fasilitasi penguatan kapasitas pemda dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang jalan	Pusat	18 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	33 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
		UBA. 204	Rincian Output: Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
		UBA. 205	Rincian Output: Penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	
		UBA. 410	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam tata kelola program tiga juta rumah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	
		UBA. 303	Rincian Output: Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	Pusat	1 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	3 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	700,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	3.000,00	
		UBA. 304	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
		UBA. 305	Rincian Output: Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	Pusat	54 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		UBA. 401	Rincian Output: Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi	Pusat	11 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	11 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	11 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 403	Rincian Output: Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 404	Rincian Output: Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 405	Rincian Output: Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 406	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan rencana induk urusan pemuda dan olahraga	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 407	Rincian Output: Daerah yang menetapkan upah minimum provinsi	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	
		UBA. 408	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan budaya gemar membaca	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	800,00	1.000,00	1.800,00	2.300,00	2.800,00	
		UBA. 409	Rincian Output: Daerah yang di fasilitasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung	Pusat	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	18 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	26 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	175,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)												
		ABL. 401	Rincian Output: Rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	175,00	200,00	-	-	-	
		ABL. 500	Rincian Output: Rekomendasi penanganan isu strategis bidang energi dan sumber daya mineral pada sub bidang geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Pusat	-	-	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	400,00	400,00	400,00	
		ABL. 501	Rincian Output: Rekomendasi pengelolaan Gerakan Nasional Konservasi dan Penghematan Energi Kolaboratif	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	750,00	750,00	750,00	
		ABL. 601	Rincian Output: Rekomendasi pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		ABL. 602	Rincian Output: Rekomendasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6140	Kegiatan: Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah									9.600,00	14.195,00	24.760,00	25.510,00	29.660,00	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Sekretariat Ditjen Otda
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dan kualitas penataan kelembagaan dan kepegawaian pada perangkat daerah													
		1	IKK 1: Jumlah daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat		2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah	2 Daerah						
		FAI. 001	Rincian Output: Asosiasi pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang optimal	Pusat	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	600,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan Kepala Daerah (KDH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat	19 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	750,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Kepala Daerah (KDH) serta Penggantian	Pusat	100 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	200 Daerah (Prov/Kab /Kota)	50 Daerah (Prov/Kab /Kota)	50 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	100 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	600,00	1.403,00	1.000,00	1.500,00	1.750,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)												
		FBA. 003	Rincian Output: Daerah yang kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-nya (DPRDnya) yang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tepat waktu	Pusat	19 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	600,00	42,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		FBA. 004	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah (KDH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Pusat	19 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	250,00	50,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		FBA. 005	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024	Pusat	272 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah daerah dengan nilai indeks kelembagaan aparatur pemerintah daerah berkategori "Baik"		-	5 Provinsi	10 Provinsi	20 Provinsi	30 Provinsi						
		UBA. 001	Rincian Output: Evaluasi efektivitas perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) perangkat daerah eksisting	Pusat	6 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (11 Provinsi + 27 Kab/Kota)	92 Daerah (20 Provinsi + 72 Kab/Kota)	146 Daerah (29 Provinsi + 117 Kab/Kota)	190 Daerah (38 Provinsi + 152 Kab/Kota)	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AAH. 001	Rincian Output: Dokumen indeks kelembagaan aparatur pemerintah daerah	Pusat	1 Surat Keputusan	-	-	-	-	358,30	-	-	-	-	
		FBA. 009	Rincian Output: Daerah yang memiliki skor indeks kelembagaan aparatur pemerintah daerah dengan kategori "Baik"	Pusat	-	5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	30 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	950,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
		FAB. 001	Rincian Output: Sistem Mutasi Elektronik (E-Mutasi)	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	160,00	50,00	160,00	160,00	160,00	
		FBA. 008	Rincian Output: Fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.081,70	-	1.500,00	1.800,00	2.000,00	
		FBA. 007	Rincian Output: Fasilitasi pembinaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Pusat	38 Provinsi	-	-	-	38 Provinsi	500,00	-	-	-	1.000,00	
		FBA. 010	Rincian Output: Provinsi yang memiliki kelembagaan air limbah domestik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Pusat	-	-	18 Provinsi	28 Provinsi	38 Provinsi	-	-	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		3	IKK 3: Jumlah rekomendasi kebijakan masukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		2 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PBL. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam rangka revisi Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	
		PBL. 003	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka revisi Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	
		PBL. 002	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan masukan revisi Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		PBL. 004	Rincian Output: Rekomendasi model ideal perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	2.000,00	1.250,00	-	-	
6141	Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah									37.200,00	100.563,56	96.541,06	92.671,31	95.895,06	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungja waban Keuangan Daerah, Direktorat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Pendapatan Daerah, Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD, Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Usaha/Layanan Daerah, dan Barang Milik Daerah													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		5 Regulasi	5 Regulasi	4 Regulasi	4 Regulasi	4 Regulasi						
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang perencanaan anggaran daerah	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		AAG. 002	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		AAG. 003	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang pendapatan daerah	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AAG. 004	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		AAG. 005	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	-	-	-	200,00	200,00	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah dokumen, data, dan informasi pengelolaan keuangan daerah		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data						
		BMA. 001	Rincian Output: Data dan informasi publik bidang perencanaan anggaran daerah	Pusat	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		BMA. 002	Rincian Output: Data dan informasi publik bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	Pusat	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		BMA. 003	Rincian Output: Data dan informasi publik bidang pengelolaan pendapatan daerah	Pusat	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		QMA. 001	Rincian Output: Peta jalan belanja pegawai di daerah	Pusat	1 Data	1 Data	1 Data	-	-	1.000,00	5.100,00	5.110,00	-	-	
		QMA. 002	Rincian Output: Basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Pusat	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	2.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		3	IKK 3: Jumlah provinsi dengan APBD mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AEG. 002	Rincian Output: Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	Pusat	1 Kegiatan	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	
		FBA. 021	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan APBD	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	2.000,00	2.060,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	
		FBA. 022	Rincian Output: Provinsi yang memenuhi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	500,00	550,00	605,00	665,50	732,05	
		FBA. 024	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	1.200,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	
		FBA. 030	Rincian Output: Fasilitasi isu aktual pengelolaan keuangan daerah	Pusat	-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		FBA. 027	Rincian Output: Provinsi yang difasilitasi dalam pencapaian realisasi belanja secara optimal	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		4	IKK 4: Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik		19 Provinsi	29 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						
		UBA. 011	Rincian Output: Provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik	Pusat	19 Provinsi	29 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	6.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nya akuntabel dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian		500 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	510 Daerah (Prov/Kab /Kota)	520 Daerah (Prov/Kab /Kota)	530 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 025	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pusat	500 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	510 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	520 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	530 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.464,10	
		UBA. 015	Rincian Output: Daerah yang melakukan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara wajar	Pusat	500 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	510 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	520 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	530 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	3.300,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	
		6	IKK 6: Jumlah daerah yang menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah		110 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	220 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	330 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	440 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FAB. 001	Rincian Output: Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Pusat	2 Modul	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	
		FBA. 023	Rincian Output: Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang keuangan daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.345,37	
		UBA. 016	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai	Pusat	110 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	
		UBA. 017	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai atas pengeluaran daerah	Pusat	-	220 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	330 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	440 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.825,00	907,50	998,25	1.098,08	
		UBA. 018	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai atas penerimaan daerah	Pusat	-	220 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	330 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	440 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	IKK 7: Jumlah daerah dengan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)		20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah	20 Daerah						
		FBA. 028	Rincian Output: Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	360 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.000,00	5.923,56	5.923,56	5.923,56	5.923,56	
		8	IKK 8: Jumlah daerah dengan proporsi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah meningkat dalam APBD	Pusat	300 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	360 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		UBA. 014	Rincian Output: Daerah dengan proporsi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah meningkat dalam APBD	Pusat	300 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	360 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	3.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		9	IKK 9: Rasio penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (local tax ratio)		1,25 Persen	1,30 Persen	1,35 Persen	1,40 Persen	1,45 Persen						
		UBA. 019	Rincian Output: Daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Pusat	-	360 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	
		UBA. 012	Rincian Output: Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Pusat	300 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		10	IKK 10: Rasio penerimaan retribusi daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto		-	0,10 Persen	0,11 Persen	0,12 Persen	0,13 Persen						
		UBA. 020	Rincian Output: Daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat	Pusat	-	360 Daerah (Prov/Kab /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		11	IKK 11: Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif		2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4 Daerah (Prov/Kab /Kota)	6 Daerah (Prov/Kab /Kota)	8 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	11 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		UBA. 013	Rincian Output: Daerah yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	Pusat	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4 Daerah (Prov/Kab /Kota)	6 Daerah (Prov/Kab /Kota)	8 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.500,00	2.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
		UBA. 021	Rincian Output: Daerah yang menerbitkan obligasi/sukuk daerah	Pusat	-	-	-	-	1 Daerah	-	-	-	-	1.000,00	
		12	IKK 12: Jumlah daerah yang memiliki Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diatas rata-rata nasional	Pusat	-	320 Daerah (Prov/Kab /Kota)	340 Daerah (Prov/Kab /Kota)	360 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	380 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 029	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan dan penginputan data perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Pusat	-	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		13	IKK 13 Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan daerah sebagai masukan	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah												
		PBL. 001.	Rincian Output: Rekomendasi pengelolaan keuangan daerah sebagai masukan revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	
		14	IKK 14 Jumlah Badan Usaha Milik Daerah Air minum yang menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR)	Pusat	-	-	200 BUMDAM	205 BUMDAM	210 BUMDAM						
		BAC. 001	Rincian Output: Badan Usaha Milik Daerah Air minum yang menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR)	Pusat	-	-	200 BUMDAM	205 BUMDAM	210 BUMDAM	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		15	IKK 15 Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan retribusi layanan kebersihan	Pusat	-	-	60 Kab/Kota	80 Kab/Kota	100 Kab/Kota						
		FBA. 032	Rincian Output: Daerah yang menerapkan retribusi layanan kebersihan	Pusat	-	-	60 Kab/Kota	80 Kab/Kota	100 Kab/Kota	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6142	Kegiatan: Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri									5.950,00	25.750,00	27.680,00	28.030,00	28.380,00	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemdagri; Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan kependudukan dan Pelayanan Publik; Pusat Strategi Kebijakan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa; Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sdm, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemdagri; Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri													
		1	IKK 1: Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri		-	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan						
		UBA. 001	Rincian Output: Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"	Pusat	-	3 Provinsi	5 Provinsi	7 Provinsi	10 Provinsi	-	1.865,00	3.050,00	4.100,00	4.150,00	
		2	IKK 2: Jumlah rekomendasi strategi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri		31 Rekomen dasi Kebijakan	33 Rekomen dasi Kebijakan	20 Rekomen dasi Kebijakan	22 Rekomen dasi Kebijakan	24 Rekomen dasi Kebijakan						
		ABL. 001	Rincian Output: Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.	Pusat	5 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	4 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	7 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	8 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	9 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	750,00	1.250,00	2.050,00	3.200,00	3.350,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABL. 002	Rincian Output: Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik.	Pusat	3 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	2 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	5 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	6 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	7 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	450,00	300,00	2.750,00	900,00	1.050,00	
		ABL. 003	Rincian Output: Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa.	Pusat	2 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	-	-	-	300,00	150,00	-	-	-	
		ABL. 004	Rincian Output: Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	Pusat	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	
		ABL. 005	Rincian Output: Rekomendasi strategi kebijakan terkait isu aktual nasional/daerah	Pusat	7 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	-	
		ABL. 007	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan penguatan strategi pusat dan daerah	Pusat	12 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	-	-	-	-	1.160,00	-	-	-	-	
		ABL. 101	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	Pusat	-	8 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	1.225,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 102	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Pengendalian Inflasi	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	150,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 103	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka	Pusat	-	3 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	-	450,00	150,00	150,00	150,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			mendukung Makan Bergizi Gratis			Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan						
		ABL. 104	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Pembangunan 3 Juta Rumah	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	300,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 105	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	300,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 106	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Swasembada dan Lumbung Pangan	Pusat	-	6 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	925,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 107	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Cek Kesehatan Gratis	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	300,00	150,00	150,00	150,00	
		ABL. 108	Rincian Output: Penguatan strategi kebijakan dalam rangka mendukung Penanganan Sampah	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	300,00	150,00	150,00	150,00	
		FBA. 004	Rincian Output: Penguatan Kapasitas Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pusat	-	14 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		FBA. 002	Rincian Output: Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	Pusat	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	
		FBA. 005	Rincian Output: Advokasi Kebijakan Program Direktif Presiden	Pusat	-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	-	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Lingkup Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa												
		FBA. 003	Rincian Output: Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pusat	38 Provinsi	-	-	-	-	540,00	-	-	-	-	
		FBA. 006	Rincian Output: Advokasi Kebijakan Program Direktif Presiden Lingkup Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	Pusat	-	14 Daerah (Prov/Kab /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		3	IKK 3: Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan	1 Rekome ndasi Strategi Kebijakan	1 Rekomen dasi Strategi Kebijakan						
		FAB. 001	Rincian Output: Sistem layanan digital IPKD	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Penilaian pengelolaan keuangan daerah	Pusat	542 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	500,00	970,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		FBA. 101	Rincian Output: Fasilitasi dan Penbinaan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pusat	-	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Sekretariat BSKDN
		FBA. 102	Rincian Output: Fasilitasi Replikasi Praktik Baik Kebijakan dalam rangka mendukung Pengendalian Inflasi	Pusat	-	5 Daerah Sasaran	5 Daerah Sasaran	5 Daerah Sasaran	5 Daerah Sasaran	-	900,00	900,00	900,00	900,00	
		4	IKK 4: Jumlah regulasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri		3 Regulasi	1 Regulasi	-	-	-						
		AAG. 001	Rincian Output: Revisi Permendagri 19	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tahun 2020 "Tentang Pedoman IPKD"												
		AAG. 002	Rincian Output: Revisi Permendagri 17 Tahun 2016 "Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah"	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	
		AAG. 003	Rincian Output: Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah"	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	
		AAG. 004	Rincian Output: Penyusunan Permendagri "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri"	Pusat	-	1 PerMen	-	-	-	-	135,00	-	-	-	
6143	Kegiatan: Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah									1.200,00					Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas kelembagaan Strategi Kebijakan daerah													
		1	IKK: Jumlah daerah yang mengalami peningkatan kualitas strategi kebijakan daerah dalam perumusan kebijakan		38 Provinsi	-	-	-	-						
		FBA. 001	Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di daerah	Pusat	38 Provinsi	-	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6144	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri									60.749,17	83.988,64	69.870,20	73.611,84	78.703,48	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengembangan SDM bidang kompetensi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah													
		1	IKK 1: Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri		11812 Orang	23875 Orang	14750 Orang	15460 Orang	16200 Orang						
		FAC. 003	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi manajemen kepemimpinan	Pusat	2669 Orang	4930 Orang	3100 Orang	3200 Orang	3300 Orang	14.781,69	17.687,99	17.690,00	19.170,00	20.750,00	
		FAC. 006	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi standarisasi dan sertifikasi	Pusat	240 Orang	370 Orang	330 Orang	360 Orang	390 Orang	652,02	985,93	740,00	770,00	810,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAC. 007	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri	Pusat	2682 Orang	2860 Orang	3000 Orang	3100 Orang	3200 Orang	6.643,67	7.145,82	7.320,00	7.670,00	8.120,00	
		FAC. 008	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional dan teknis	Pusat	1741 Orang	4200 Orang	1830 Orang	1850 Orang	1900 Orang	5.353,88	12.507,43	8.100,00	8.030,00	8.550,00	
		FAC. 009	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukittinggi) , Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	3610 Orang	8845 Orang	4240 Orang	4550 Orang	4860 Orang	18.522,62	36.145,95	27.950,00	29.500,00	31.600,00	
		FAC. S01	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 5 hari bidang standarisasi dan sertifikasi	Pusat	30 Orang	120 Orang	90 Orang	120 Orang	150 Orang	76,92	315,18	230,76	307,68	384,60	
		FAC. S02	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan	Pusat	30 Orang	120 Orang	90 Orang	120 Orang	150 Orang	88,32	358,61	264,98	353,30	441,63	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			kompetensi 6 hari bidang standarisasi dan sertifikasi												
		FAC. S03	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 5 hari bidang pemerintahan dalam negeri	Pusat	60 Orang	210 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	153,84	551,57	153,84	153,84	153,84	
		FAC. S04	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 5 hari bidang manajemen kepemimpinan	Pusat	30 Orang	210 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	153,84	551,57	232,60	232,60	232,60	
		FAC. S05	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 5 hari bidang fungsional dan teknis	Pusat	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	153,84	157,59	153,84	153,84	153,84	
		FAC. S06	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 12 hari bidang fungsional dan teknis	Pusat	60 Orang	150 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	964,98	729,27	290,63	290,63	290,63	
		FAC. S07	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi 14 hari bidang fungsional dan teknisan kompetensi fungsional dan teknis	Pusat	-	120 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	-	686,67	342,10	342,10	342,10	
		UAC. 002	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota	360 Orang	390 Orang	390 Orang	390 Orang	390 Orang	520,61	1.024,35	1.024,35	1.024,35	1.024,35	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Yogyakarta), Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukittinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)											
		UAC. 003	Rincian Output: Camat yang mengikuti pengembangan kompetensi manajemen strategi pembangunan	Pusat	-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	-	1.301,53	1.301,53	1.301,53	1.301,53	
		UAC. 004	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	Pusat	120 Orang	570 Orang	600 Orang	630 Orang	660 Orang	1.258,26	2.266,62	2.345,42	2.424,22	2.503,01	
		UAC. 005	Rincian Output: Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Pusat	30 Orang	210 Orang	240 Orang	270 Orang	300 Orang	216,92	551,57	630,37	709,17	787,97	
		UAC. 007	Rincian Output: Pejabat fungsional penata perizinan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pusat	60 Orang	210 Orang	240 Orang	270 Orang	300 Orang	857,75	1.020,99	1.099,78	1.178,58	1.257,38	
		2	IKK 2: Jumlah Kepala Daerah (KDH), Wakil Kepala Daerah (WKDH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengikuti orientasi dan		1092 Orang	-	-	-	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pendalaman tugas												
		UAC. 001	Rincian Output: Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) yang mengikuti orientasi	Pusat	1092 Orang	-	-	-	-	10.350,00	-	-	-	-	
010. CP	PROGRAM TATA KELOLA KEPENDUDUKAN									2.272.642,05	2.069.744,71	3.125.157,64	2.893.131,45	3.091.383,83	
		Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital													Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1	IKP: Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik"		150 Daerah (Kumulatif)	275 Daerah (Kumulatif)	365 Daerah (Kumulatif)	444 Daerah (Kumulatif)	514 Daerah (Kumulatif)						
1268	Kegiatan: Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan									552.695,14	454.898,70	2.476.805,19	2.665.358,45	2.869.446,83	Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional, Direktorat Integrasi Data Kependudukan
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas, kuantitas sistem informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan													
		1	IKK 1: Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik		1300 Lembaga pengguna	1375 Lembaga pengguna	1450 Lembaga pengguna	1530 Lembaga pengguna	1610 Lembaga pengguna						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BDB. 001	Rincian Output: Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama data kependudukan nasional	Pusat	1000 Lembaga	1015 Lembaga	1030 Lembaga	1050 Lembaga	1070 Lembaga	2.600,46	2.660,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		BDB. 002	Rincian Output: Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama data kependudukan daerah	Pusat	300 Lembaga	360 Lembaga	420 Lembaga	480 Lembaga	540 Lembaga	650,00	624,22	750,00	750,00	750,00	
		QAB. 001	Rincian Output: Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan berbasis NIK nasional	Pusat	1300 Lembaga	1375 Lembaga	1450 Lembaga	1530 Lembaga	1610 Lembaga	12.902,17	14.852,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	
		BDB. 003	Rincian Output: Lembaga yang difasilitasi dalam integrasi data kependudukan nasional	Pusat	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	105 Lembaga	105 Lembaga	1.109,82	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam integrasi data kependudukan daerah	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.773,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dikelola dan dikembangkan		4 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi						
		FAB. 001	Rincian Output: Sistem informasi integrasi data dan dokumen kependudukan nasional	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	34.023,65	6.788,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		FAB. 002	Rincian Output: Sistem informasi bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	197,00	197,00	220,00	240,00	250,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAB. 003	Rincian Output: Sistem informasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	250,00	350,00	250,00	250,00	250,00	
		FAB. 004	Rincian Output: Sistem informasi administrasi kependudukan	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	181.346,82	110.293,94	201.179,00	221.297,00	243.427,00	
		FAB. 005	Rincian Output: Sistem informasi aplikasi SIAK terpusat	Pusat	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	5.681,92	18.000,00	20.000,00	22.000,00	
		FAB. 006	Rincian Output: Sistem informasi pengelolaan KTP-el berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biometrik	Pusat	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	93.483,23	224.233,00	217.876,00	208.869,00	
		3	IKK 3: Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan		1300 Lembaga pengguna	1410 Lembaga pengguna	1545 Lembaga pengguna	1580 Lembaga pengguna	1625 Lembaga pengguna						
		BDB. 004	Rincian Output: Lembaga pengguna yang memberikan data balikan nasional	Pusat	1000 Lembaga	1010 Lembaga	1020 Lembaga	1030 Lembaga	1050 Lembaga	2.201,61	1.800,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	
		BDB. 005	Rincian Output: Lembaga pengguna yang memberikan data balikan daerah	Pusat	300 Lembaga	400 Lembaga	525 Lembaga	550 Lembaga	575 Lembaga	400,00	250,00	450,00	450,00	450,00	
		4	IKK 4: Persentase kebutuhan sarpras yang dipenuhi dan diremajakan		15% Kebutuhan Sarpras Terpenuhi dan Diremaja kan	30% Kebutuhan Sarpras Terpenuhi dan Diremaja kan	45% Kebutuhan Sarpras Terpenuhi dan Diremaja kan	60% Kebutuhan Sarpras Terpenuhi dan Diremaja kan	100% Kebutuhan Sarpras Terpenuhi dan Diremaja kan						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CAN. 001	Rincian Output: Sarpras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), serta <i>Data Center</i> (DC) dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) kependudukan	Pusat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	135.013,61	6.268,37	1.041.092,00	1.145.202,00	1.259.722,00	
		CAN. 002	Rincian Output: Sarpras data warehouse pemanfaatan data kependudukan	Pusat	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	543.648,00	598.013,00	657.815,00	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang menerapkan pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar lembaga		-	45 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	50 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	55 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	60 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerbitan data kependudukan nasional	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.438,04	10.091,00	10.192,00	10.294,00	
		UBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar lembaga	Pusat	-	45 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	50 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	55 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	60 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	1.311,30	2.550,00	2.576,00	2.602,00	
		6	IKK 6: Jumlah daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi data secara nasional		552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		CBT. 001	Rincian Output: Jaringan komunikasi data online	Pusat	552 Lokasi	552 Lokasi	552 Lokasi	552 Lokasi	552 Lokasi	182.000,00	203.224,05	372.342,19	383.512,45	395.017,83	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	IKK 7: Persentase pengintegrasian data tunggal sosial ekonomi nasional dengan administrasi kependudukan dan statistik hayati		-	25%	50%	75%	100%						
		QMA. 001	Rincian Output: Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Admnduk dan Statistik Hayati	Pusat	-	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	-	703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1269	Kegiatan: Pembinaan Administrasi Kependudukan									229.073,85	245.552,16	223.233,00	218.876,00	212.369,00	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Sekretariat
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan		-	2 Regulasi	-	-	-						
		AAG. 001	Rincian Output: Revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Pusat	-	1 PerMen	-	-	-	-	86,00	-	-	-	
		AAG. 002	Rincian Output: Revisi Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil	Pusat	-	1 PerMen	-	-	-	-	200,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Perkembangan Kependudukan												
		AAH. 001	Rincian Output: Kepmendagri mengenai penyusunan pedoman pelayanan pencatatan perkawinan campuran dalam perspektif adminduk	Pusat	-	1 Surat Keputusan	-	-	-	-	200,00	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang administrasi kependudukan		-	3 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	5 Rekomen dasi Kebijakan	6 Rekomen dasi Kebijakan						
		PBM. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan masukan Revisi Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		ABM. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di daerah	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	52,15	-	-	400,00	
		ABM. 002	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan nasional	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	200,00	-	-	-	
		ABM. 003	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pembinaan aparat kependudukan dan pencatatan sipil	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	200,00	200,00	200,00	
		ABM. 004	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan bidang pendaftaran penduduk dan	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi kebijakan	1 Rekomen dasi kebijakan	-	-	150,00	150,00	150,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pendaftaran sipil												
		ABM. 005	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pusat	-	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
		3	IKK 3: Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran		96,00%	97,00%	98,00%	99,00%	99,80%						
		QAA. 001	Rincian Output: Akta kelahiran yang diterbitkan	Pusat	550.000 Akta	745.000 Akta	823.265 Akta	901.530 Akta	979.795 Akta	1.100,00	546,50	1.320,00	1.500,00	1.600,00	
		4	IKK 4: Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pendaftaran sipil		60%	62%	64%	65%	67%						
		QAA. 002	Rincian Output: Akta kematian yang diterbitkan	Pusat	400.000 Akta	425.000 Akta	450.000 Akta	475.000 Akta	500.000 Akta	600,00	224,00	680,00	700,00	800,00	
		QAA. 003	Rincian Output: Akta perkawinan yang diterbitkan	Pusat	35.000 Akta	1.360.364 Akta	1.360.364 Akta	1.360.364 Akta	1.360.364 Akta	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
		QAA. 004	Rincian Output: Akta perceraian yang diterbitkan	Pusat	4.500 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
		BAA. 002	Rincian Output: Penerbitan Kartu Identitas Anak dalam layanan adminduk	Pusat	-	372.927 Orang	372.927 Orang	372.927 Orang	372.927 Orang	-	150,00	200,00	250,00	300,00	
		5	IKK 5: Jumlah keping blangko KTP-el untuk daerah yang dipenuhi		22.000.000 keping	20.000.0 00 Keping	19.000.0 00 Keping	18.000.00 0 Keping	17.000.00 0 Keping						
		BAA. 001	Rincian Output: Blangko KTP-el untuk daerah	Pusat	22.000.000 keping	20.000.00 0 Keping	19.000.00 0 Keping	18.000.000 Keping	17.000.000 Keping	225.709,85	224.852,62	198.458,00	188.276,00	178.094,00	
		6	IKK 6: Jumlah daerah yang menerapkan pelayanan		-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sesuai standar												
		UBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Pusat	-	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	30 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	969,78	950,00	1.500,00	2.000,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pusat	-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	-	1.781,10	3.175,00	3.900,00	4.625,00	
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi penyediaan data penduduk potensial Pemilu	Pusat	-	-	-	38 Provinsi	38 Provinsi	-	-	-	2.500,00	2.500,00	
		7	IKK 7: Jumlah daerah yang menerapkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		-	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	14.660,01	14.000,00	15.500,00	17.000,00	
1271	Kegiatan: Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									25.721,07	3.417,00	6.657,00	7.297,00	7.968,00	Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan													
		1	IKK 1: Jumlah daerah yang menerapkan pembinaan dan pengawasan aparatur penyelenggara adminduk		552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi dan pengembangan administrasi kependudukan dengan perguruan tinggi	Pusat	-	2 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	80,28	250,00	275,00	300,00	
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil	Pusat	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	5.503,00	2.599,72	4.602,00	5.062,00	5.568,00	
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi penerapan inovasi pelayanan adminduk di daerah	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	442,00	605,00	660,00	700,00	
		2	IKK 2: Jumlah Dinas Dukcapil yang menerapkan zona integritas		-	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 004	Rincian Output: Fasilitasi penerapan zona integritas Dinas Dukcapil	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	295,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
		3	IKK 3: Jumlah daerah yang menerapkan pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar lembaga		40 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-						
		FBA. 005	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam integrasi data kependudukan daerah	Pusat	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	3.650,00	-	-	-	-	
		UBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar lembaga	Pusat	40 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4	IKK 4: Jumlah regulasi bidang sistem administrasi kependudukan		1 Regulasi	-	-	-	-						
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang menerapkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang sesuai standar		70 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-						
		UBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	923,60	-	-	-	-	
		FBA. 006	Rincian Output: Fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pusat	70 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	
		6	IKK 6 : Jumlah daerah yang menerapkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-						
		FBA. 007	Rincian Output: Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pusat	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	11.444,47	-	-	-	-	
6997	Kegiatan: Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital									1.465.152,00	1.365.876,85	418.462,45	1.600,00	1.600,00	Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional, Direktorat Pendaftaran Penduduk dan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Pencatatan Sipil, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya sistem kependudukan dan pencatatan sipil, serta memperkenalkan identitas digital untuk memungkinkan semua warga negara dan penduduk Indonesia mengakses pelayanan pemerintah dan swasta yang lebih baik.													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi bidang penyelenggaraan identitas digital		-	1 Regulasi	-	-	-						
		PAD. 001	Rincian Output: Peraturan Presiden mengenai identitas kependudukan digital	Pusat	-	1 PerPres	-	-	-	-	440,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Jumlah pedoman bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan		5 Pedoman	1 Pedoman	-	-	-						
		AFA. 001	Rincian Output: Standar autentikasi biometrik dan teknologi deduplikasi adminduk	Pusat	1 NSPK	-	-	-	-	2.929,99	-	-	-	-	
		AFA. 002	Rincian Output: Roadmap e-KYC dan sistem otentikasi biometrik	Pusat	2 NSPK	-	-	-	-	9.770,00	-	-	-	-	
		AFA. 003	Rincian Output: Roadmap pengadaan infrastruktur TIK dan informasi serta keamanan siber	Pusat	1 NSPK	-	-	-	-	11.291,46	-	-	-	-	
		AFA. 004	Rincian Output: Pedoman teknis pemanfaatan data untuk mendukung lembaga pengguna berintegrasi dengan layanan Dukcapil	Pusat	1 NSPK	-	-	-	-	2.482,85	-	-	-	-	
		AFA. 005	Rincian Output: Penyusunan Bisnis Proses Reengineering untuk pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	-	-	-	3.846,18	5.000,00	-	-	-	
		3	IKK 3: Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggara- an identitas digital		8 Rekomen dasi Kebijakan	7 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-						
		ABM. 001	Rincian Output: Rekomendasi penegakan hukum penyelenggaraan adminduk	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.380,00	1.100,00	-	-	-	
		ABM. 002	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan adminduk	Pusat	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	12.028,88	5.772,60	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABM. 003	Rincian Output: Grand desain penyelenggaraan adminduk	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.550,00	1.550,00	-	-	-	
		ABM. 004	Rincian Output: Inisiatif srategis administrasi kependudukan pemerintah daerah	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	2.380,00	2.380,00	-	-	-	
		ABM. 005	Rincian Output: Rekomendasi standarisasi peralatan pelayanan adminduk	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	711,20	-	-	-	-	
		ABM. 006	Rincian Output: Rekomendasi dan desain intervensi sistematis layanan adminduk di daerah perbatasan	Pusat	2 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	870,00	-	-	-	-	
		ABM. 007	Rincian Output: Rekomendasi Mekanisme Sistem Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Optimal dan Inklusif	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	
		ABM. 008	Rincian Output: Penyusunan Grand Design Digital ID, eKYC, Biometrik, Platform Pertukaran Data, dan Infrastruktur TIK	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	21.010,00	-	-	-	
		4	IKK 4: Jumlah daerah dengan kinerja layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meningkat		125 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-						
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	29.997,40	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			daerah 12 provinsi dengan cakupan yang rendah												
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan dan monitoring program jemput bola nasional untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), daerah dengan cakupan kinerja rendah dan kelompok penduduk rentan	Pusat	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	65.460,00	48.000,00	15.650,00	-	-	
		FBA. 003	Rincian Output: Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan rekomendasi mekanisme optimalisasi sistem layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara inklusif	Pusat	552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	8.521,65	-	-	-	-	
		FBA. 004	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pusat	6 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	995,20	-	-	-	-	
		BAH. 001	Rincian Output: Layanan manajemen Project Management Unit (PMU) ID digital	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	-	40.173,00	33.775,60	44.673,00	-	-	
		FBA. 005	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam pendaftaran penduduk melalui layanan jemput bola di daerah	Pusat	-	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	6.600,00	23.225,49	-	-	
		5	IKK 5: Jumlah Sarana dan Prasarana (Sarpras) infrastruktur teknologi		1526 Unit	2.106 Unit	813 Unit	-	-						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			informasi dan komunikasi Dukcapil yang dipenuhi												
		CAN. 001	Rincian Output: Sarana dan prasarana pelayanan adminduk untuk pusat	Pusat	180 Unit	180 Unit	-	-	-	16.807,16	15.287,16	-	-	-	
		CAN. 002	Rincian Output: Sarana dan prasarana pelayanan adminduk untuk daerah	Pusat	1.104 Unit	1.104 Unit	-	-	-	76.341,26	163.718,16	-	-	-	
		CAN. 003	Rincian Output: Perangkat dan jaringan layanan adminduk di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	Pusat	43 Unit	149 Unit	149 Unit	-	-	9.230,82	11.500,00	33.088,10	-	-	
		CAN. 004	Rincian Output: Sarana dan prasarana digitalisasi dokumen kependudukan	Pusat	40 Unit	514 Unit	514 Unit	-	-	3.850,00	17.000,00	9.000,00	-	-	
		CAN. 005	Rincian Output: Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dukcapil	Pusat	159 Unit	159 Unit	150 Unit	-	-	693.311,50	668.361,28	100.000,00	-	-	
		6	IKK 6: Jumlah sistem e-KYC dan digital ID yang ditingkatkan		19 Sistem Informasi	10 Sistem Informasi	10 Sistem Informasi	-	-						
		FAB. 001	Rincian Output: Command center, dan peningkatan keamanan informasi dan siber Dukcapil	Pusat	4 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	-	-	30.810,86	77.913,83	31.105,86	-	-	
		FAB. 002	Rincian Output: Sistem informasi notifikasi otomatis antara layanan adminduk dan layanan eksternal	Pusat	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	11.750,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAB. 003	Rincian Output: Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan ID digital, serta pengelolaan lembaga pengguna	Pusat	4 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	-	-	26.744,00	29.832,00	38.942,00	-	-	
		FAB. 004	Rincian Output: Tanda tangan elektronik dan standardisasi data alamat	Pusat	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	-	-	54.800,00	54.800,00	54.800,00	-	-	
		FAB. 005	Rincian Output: Platform untuk berbagi dan pertukaran data Dukcapil	Pusat	6 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	-	-	43.000,00	43.000,00	46.000,00	-	-	
		FAB. 006	Rincian Output: Sistem informasi pemanfaatan data kependudukan daerah	Pusat	1 Sistem Informasi	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	
		FAB. 007	Rincian Output: Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	17.370,00	13.950,00	17.370,00	-	-	
		7	IKK 7: Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan		552 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	552 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-						
		FAC. 001	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur tentang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pemeliharaan dan peningkatan platform untuk berbagi dan pertukaran data, tata cara integrasi dengan ID digital dan sistem e-KYC	Pusat	-	253 Orang	-	-	-	-	2.300,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAC. 002	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur untuk sertifikasi dan pelatihan ISO	Pusat	2400 Orang	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	
		FAC. 003	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam rangka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pusat	2208 Orang	2208 Orang	-	-	-	7.583,22	7.813,40	-	-	-	
		FAC. 004	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan layanan adminduk	Pusat	1200 Orang	1200 Orang	-	-	-	8.879,00	29.600,00	-	-	-	
		FAC. 005	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil	Pusat	2.798 Orang	-	-	-	-	67.939,38	-	-	-	-	
		FAC. 006	Rincian Output: Capacity Building, Conference, dan Training (Benchmarking) terkait data utilisasi	Pusat	-	506 Orang	-	-	-	-	13.900,40	-	-	-	
		AEH. 001	Rincian Output: Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital skala nasional maupun internasional	Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1.152,00	3.967,60	-	-	-	
		BMB. 001	Rincian Output: Rebranding Dukcapil	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-	36.348,00	23.868,00	-	-	-	
		8	IKK 8: Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP		9%	20%	30%	40%	50%						
		UAB. 001	Rincian Output: Aplikasi ID digital	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	153.847,00	58.936,82	3.008,00	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FBA. 006	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Pusat	-	-	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	546 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
010. CR	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM									163.965,75	306.819,30	242.869,30	240.019,30	244.669,30	
		Sasaran Program (<i>Outcome</i>) : Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi													Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1	IKP 1: Jumlah provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berkategori "Tinggi"		18 daerah	19 daerah	20 daerah	21 daerah	23 daerah						
		2	IKP 2: Indeks Kinerja Ormas		Nilai 67	Nilai 68	Nilai 69	Nilai 70	Nilai 71						
		Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Meningkatnya aktualisasi nilai- nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Indonesia, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri													Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
		1	IKP 1: Indeks Harmoni Indonesia		Nilai 6,5	Nilai 6,6	Nilai 6,7	Nilai 6,8	Nilai 6,9						
		2	IKP 2: Indeks Kewaspadaan Nasional		Nilai 75	Nilai 76	Nilai 77	Nilai 78	Nilai 80						
1233	Kegiatan: Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya									11.476,62	46.150,00	27.400,00	28.900,00	29.550,00	Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya; Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Memperkokoh ideologi Pancasila dan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya													
		1	IKK 1: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-						
		ABC. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
		FBA. 001	Rincian Output: Komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan dalam menjaga keutuhan NKRI	Pusat	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab /Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	689,33	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		FBA. 004	Rincian Output: Fasilitasi Penguatan Nilai Sejarah Kebangsaan serta Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara Bagi Generasi Muda dalam rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045	Pusat	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	450,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		FBA. 005	Rincian Output: Fasilitasi peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara	Pusat	20 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dalam menjaga keutuhan NKRI												
		FBA. 008	Rincian Output: Internalisasi nilai-nilai Pancasila	Pusat	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	
		FBA. 009	Rincian Output: Dialog interaktif terkait anti hoax dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)	Pusat	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	-	-	-	450,00	-	-	-	-	
		FBA. 013	Rincian Output: Fasilitasi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Rawan Konflik	Pusat	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	987,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		UBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi penguatan karakter dan wawasan kebangsaan dalam membangun harmoni kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	
		UAC. 001	Rincian Output: Fasilitasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI bagi aparat	Pusat	180 Orang	3000 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	900,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		FBA. 016	Rincian Output: Fasilitasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah tertinggal terentaskan	Pusat	-	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	7 Daerah (Prov/Kab/Kota)	8 Daerah (Prov/Kab/Kota)	9 Daerah (Prov/Kab/Kota)	-	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	
		FBA. 010	Rincian Output: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	950,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		FBA. 015	Rincian Output: Fasilitasi pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Pusat	20 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	350,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dan penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)												
		3	IKK 3: Jumlah daerah dengan Indeks Harmoni Indonesia berkategori "Bagus"		4 Daerah	9 Daerah	9 Daerah	10 Daerah	12 Daerah						
		FBA. 016	Rincian Output: Daerah dengan Indeks Harmoni Indonesia berkategori "Bagus"	Pusat	-	9 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	9 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	4.000,00	850,00	950,00	1.000,00	
		FBA. 002	Rincian Output: Komunikasi sosial dan pembahasan isu-isu strategis bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	800,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi ketahanan ekonomi dan kerjasama intelijen ekonomi	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	350,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	
		FBA. 006	Rincian Output: Fasilitasi penguatan seni dan budaya Indonesia serta produk dalam negeri dalam rangka ketahanan identitas bangsa	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	250,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
		QDC. 001	Rincian Output: Fasilitasi penguatan nasionalisme bagi generasi muda dalam menggelorakan nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Pusat	500 Orang	4000 Orang	800 Orang	1000 Orang	800 Orang	500,00	4.000,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	
		FAC. 001	Rincian Output: Peningkatan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang intelijen ekonomi	Pusat	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4	IKK 4: Jumlah daerah yang membentuk tim terpadu dan melaksanakan rencana aksi daerah P4GN di daerah		64 Daerah (Prov/Kab/Kota)	64 Daerah (Prov/Kab/Kota)	64 Daerah (Prov/Kab/Kota)	64 Daerah (Prov/Kab/Kota)	64 Daerah (Prov/Kab/Kota)						
		UBA. 001	Rincian Output: Fasilitas pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika.	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		5	IKK 5: Jumlah daerah yang membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melaporkan implementasi penguatan moderasi beragama di daerah		38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)						
		UBA. 002	Rincian Output: Fasilitas pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, dan golongan	Pusat	5 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		6	IKK 6: Persentase pelaksanaan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial		66%	67%	68%	68%	70%						
		UBA. 004	Rincian Output: Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (PKS) di daerah melalui tim terpadu	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
1234	Kegiatan: Peningkatan Kewaspadaan Nasional									6.000,00	42.400,00	33.000,00	33.300,00	33.550,00	Direktorat Kewaspadaan Nasional

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini													
		1	IKK 1: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kewaspadaan nasional		1 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan						
		ABC. 001	Rincian Output: Rekomendasi Kebijakan bidang kewaspadaan nasional	Pusat	1 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	100,00	1.050,00	150,00	200,00	200,00	
		2	IKK 2: Jumlah daerah dengan Indeks Kewaspadaan Nasional berkategori "Baik"		3 Provinsi	9 Provinsi	12 Provinsi	15 Provinsi	18 Provinsi						
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah dengan Indeks Kewaspadaan Nasional berkategori "Baik"	Pusat	-	9 Daerah (Prov/Kab /Kota)	12 Daerah (Prov/Kab /Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	18 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	
		FBA. 003	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam penanganan konflik pemerintahan	Pusat	-	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	-	1.000,00	400,00	450,00	500,00	
		BKA. 001	Rincian Output: Deteksi dini dalam rangka kewaspadaan nasional	Pusat	417 Laporan	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
		FBA. 006	Rincian Output: Deteksi Dini melalui Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		ACB. 001	Rincian Output: Fasilitasi pelayanan dan perizinan penelitian orang asing dan lokal	Pusat	300 Orang	300 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi kewaspadaan nasional	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	1.700,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AEB. 001	Rincian Output: Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme	Pusat	-	4 Forum	4 Forum	4 Forum	4 Forum	-	750,00	750,00	750,00	750,00	
		AEB. 002	Rincian Output: Komunikasi sosial bidang kewaspadaan nasional	Pusat	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		UAC. 001	Rincian Output: Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	Pusat	200 Orang	600 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	2.000,00	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		FBA. 007	Rincian Output: Kewaspadaan Nasional Berbasis Kewaspadaan Informasi	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
		FBA. 005	Rincian Output: Pembinaan dan Monev FORKOPIMDA	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
		FBA. 008	Rincian Output: Penggalangan dan Cipta Kondisi terhadap Ancaman, Hambatan Gangguan Stabilitas Sosial dan Politik Dalam Negeri	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3	IKK 3: Jumlah daerah dengan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) berkategori "Baik"		-	1 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)						
		FBA. 004	Rincian Output: Penguatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (ITKPU-PUM)	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6145	Kegiatan: Pembinaan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan									146.489,13	218.269,30	182.469,30	177.819,30	181.569,30	Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Organisasi Kemasyara Katan
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri													
		1	IKK 1: Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori "Baik"		12 Daerah	14 Daerah	16 Daerah	18 Daerah	20 Daerah						
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori "Baik"	Pusat	3 Daerah (Prov/Kab/Kota)	9 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	18 Daerah (Prov/Kab/Kota)	200,00	4.000,00	300,00	350,00	400,00	
		AEB. 001	Rincian Output: Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Penanganan Isu-Isu Strategis/Aktual Bidang Organisasi	Pusat	5 Forum	15 Forum	15 Forum	15 Forum	15 Forum	1.950,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
		BDD. 001	Rincian Output: Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan	Pusat	220 Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	
		FBA. 001	Rincian Output: Pembinaan Kesbangpol Daerah dalam Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.150,00	4.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		QDC. 002	Rincian Output: Peningkatan kapasitas tata kelola manajemen pengurus organisasi kemasyarakatan (Bimbingan teknis)	Pusat	2000 Orang	3450 Orang	3000 Orang	3500 Orang	4000 Orang	2.000,00	4.750,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABC. 001	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan	Pusat	-	2 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		BDD. 002	Rincian Output: Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Pusat	-	75 Organisasi Kemasyara katan	25 Organisasi Kemasyara katan	25 Organisasi Kemasyara katan	25 Organisasi Kemasyara katan	-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) meningkat		3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi	3 Provinsi						
		AEB. 002	Rincian Output: Komunikasi sosial dan Penanganan IsuIsu Strategis/Aktual bidang politik dalam negeri	Pusat	1 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi penguatan demokrasi bagi masyarakat di daerah	Pusat	2 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	12 Daerah (Prov/Kab /Kota)	13 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	14 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	
		PEB. 001	Rincian Output: Pengembangan literasi politik masyarakat	Pusat	6 Forum	20 Forum	8 Forum	8 Forum	8 Forum	900,00	4.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		QDB. 001	Rincian Output: Fasilitasi penguatan tata kelola partai politik	Pusat	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	400,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00	
		UBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	Pusat	19 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		UBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi	Pusat	19 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		QDC. 001	Rincian Output: Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus partai politik	Pusat	400 Orang	1000 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	600,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABC. 002	Rincian Output: Rekomendasi, Proyeksi dan Refleksi Perkembangan Politik Dalam Negeri	Pusat	3 Rekomen dasi	3 Rekomen dasi	3 Rekomen dasi	3 Rekomen dasi	3 Rekomen dasi	900,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	
		BDC. 001	Rincian Output: Seleksi Anggota Penyelenggara Pemilu	Pusat	-	12 Orang	12 Orang	-	-	-	12.000,00	5.000,00	-	-	
		FBA. 006	Rincian Output: Fasilitasi Penyusunan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.530,17	3.530,17	3.530,17	3.530,17	
		FBA. 007	Rincian Output: Sinkronisasi Asta Cita dan Program Prioritas Presiden dalam Tata Kelola Politik dan Pemerintahan Umum yang Inklusif dan Berintegritas	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		FBA. 008	Rincian Output: Konsolidasi Nasional Guna Menciptakan Stabilitas Politik untuk Mendukung Pelaksanaan Asta Cita	Pusat	-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3	IKK 3: Persentase partai politik yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik setelah diaudit oleh BPK kepada Menteri Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		BDB. 001	Rincian Output: Fasilitasi kelengkapan administrasi dan pengelolaan bantuan keuangan partai politik	Pusat	-	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	-	1.000,00	200,00	200,00	200,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAE. 001	Rincian Output: Fasilitasi dan evaluasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik	Pusat	8 Lembaga	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	
		4	IKK 4: Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan partai politik untuk pendidikan politik		100%	100%	100%	100%	100%						
		QEI. 001	Rincian Output: Bantuan keuangan ke partai politik	Pusat	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	134.489,13	134.489,13	134.489,13	134.489,13	134.489,13	
		5	IKK 5: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang kepemiluan dan partai politik		2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan						
		PBC. 001	Rincian Output: Kebijakan bidang politik dalam negeri	Pusat	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	2 Rekomen dasi Kebijakan	800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		6	IKK 6: Jumlah rekomendasi kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan		-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-						
		PBC. 002	Rincian Output: Kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan	Pusat	-	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	1.000,00	-	-	
		PBC. 003	Rincian Output: Rekomendasi kebijakan pertimbangan urgensi terhadap dana abadi organisasi kemasyarakatan	Pusat	-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	IKK 7: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum		-	-	-	-	82%						
		FBA. 005	Rincian Output: Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Pusat	-	-	-	-	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	-	-	-	-	2.000,00	
010. WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									2.037.205,86	4.570.704,46	4.872.418,85	5.254.018,72	5.657.242,47	
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri													Kementerian Dalam Negeri
		1	IKP 1: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai 4,21	Nilai 4,22	Nilai 4,23	Nilai 4,24	Nilai 4,25						
		2	IKP 2: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		Nilai 92,08	Nilai 92,09	Nilai 92,10	Nilai 92,11	Nilai 92,12						
		3	IKP 3: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		4	IKP 4: Indeks Sistem Merit		Nilai 375	Nilai 377	Nilai 379	Nilai 381	Nilai 383						
		5	IKP 5: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai 77	Nilai 78	Nilai 79	Nilai 80	Nilai 81						
		6	IKP 6: Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Nilai 3,4	Nilai 3,5	Nilai 3,6	Nilai 3,7	Nilai 3,8						
		7	IKP 7: Tingkat digitalisasi arsip		Nilai 85	Nilai 85	Nilai 85	Nilai 85	Nilai 85						
		8	IKP 8: Indeks Reformasi Hukum		Nilai 89	Nilai 90	Nilai 92	Nilai 94	Nilai 95						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		9	IKP 9: Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan		Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4						
		10	IKP 10: Persentase layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		11	IKP 11: Persentase layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		12	IKP 12: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		13	IKP 13: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		14	IKP 14: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%						
		15	IKP 15: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		16	IKP 16: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		17	IKP 17: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		18	IKP 18: Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		19	IKP 19: Persentase layanan dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		20	IKP 20: Persentase layanan dukungan manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		21	IKP 21: Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		64,85 %	67,98 %	71,11 %	74,24 %	77,37 %						
		Sasaran Program (Outcome): Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas													IPDN
		1	IKP 1: Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude		D-IV (23%) S-2 (6%) S-3 (6%) Program Profesi Kepamong prajaan (29%)	D-IV (24%) S-2 (7%) S-3 (7%) Program Profesi Kepamong prajaan (30%)	D-IV (25%) S-2 (8%) S-3 (8%) Program Profesi Kepamong prajaan (31%)	D-IV (26%) S-2 (9%) S-3 (9%) Program Profesi Kepamong prajaan (32%)	D-IV (27%) S-2 (10%) S-3 (10%) Program Profesi Kepamong prajaan (33%)						
		2	IKP 2: Publikasi hasil penelitian IPDN dalam jurnal terakreditasi dan bereputasi		20 Publikasi	21 Publikasi	22 Publikasi	23 Publikasi	24 Publikasi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	IKP 3: Jumlah pengabdian masyarakat yang diimplementasikan		17 Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	18 Pengabdi an kepada Masyara kat (PKM)	19 Pengabdi an kepada Masyara kat (PKM)	20 Pengabdian kepada Masyara kat (PKM)	21 Pengabdian kepada Masyara kat (PKM)						
		Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas pengawasan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah													Inspektorat Jenderal
		1	IKP 1: Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah		Nilai 3	Nilai 3,05	Nilai 3,07	Nilai 3,1	Nilai 3,15						
		2	IKP 2: Indeks Pengawasan Kementerian Dalam Negeri		Nilai 3	Nilai 3,05	Nilai 3,07	Nilai 3,1	Nilai 3,15						
4255	Kegiatan: Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu									89.271,81	105.160,63	110.418,67	115.939,60	121.736,58	Sekretariat Dewan Kehormatan Penyeleng Gara Pemilu
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu													
		1	IKK 1: Peningkatan nilai Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		Meningkat 3,13 dari tahun sebelum nya	Meningkat 3,13 dari tahun sebelum nya	Meningkat 3,13 dari tahun sebelum nya	Meningkat 3,13 dari tahun sebelum nya	Meningkat 3,13 dari tahun sebelum nya						
		QAB. 001	Rincian Output: Layanan penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	Pusat	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	3.000,00	6.837,61	7.179,49	7.538,46	7.915,38	
		QAH. 001	Rincian Output: Layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	49.019,23	44.188,10	46.397,50	48.717,37	51.153,24	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Jumlah penanganan sengketa hukum di lembaga peradilan		80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara						
		BCB. 001	Rincian Output: Penanganan perkara litigasi	Pusat	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	80 Perkara	1.608,38	2.975,49	3.273,04	3.600,34	3.960,37	
		2	IKK 2: Jumlah daerah yang difasilitasi dalam advokasi hukum		64 Daerah	64 Daerah	64 Daerah	64 Daerah	64 Daerah						
		EBA. 001	Rincian Output: Layanan non litigasi hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.227,80	2.046,14	2.250,75	2.475,83	2.723,41	
		3	IKK 3: Jumlah penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan		50 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan	50 Rancangan Peraturan						
		EBA. 002	Rincian Output: Layanan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.761,21	4.300,00	4.730,00	5.203,00	5.723,30	
		4	IKK 4: Jumlah telaahan dan kajian terkait kebijakan pusat dan kebijakan daerah serta pemberian nomor registrasi produk hukum daerah		505 Kebijakan	510 Kebijakan	515 Kebijakan	520 Kebijakan	525 Kebijakan						
		EBA. 003	Rincian Output: Layanan fasilitasi telaahan kebijakan pusat dan kebijakan daerah	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.679,62	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Hukum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 004	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	972,81	1.758,37	1.934,21	2.127,63	2.340,39	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6	IKK 6: Indeks Kualitas Kebijakan		Nilai 75	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 95						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.150,19	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
		Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri													
		1	IKK 1: Jumlah penyelesaian kerja sama kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri		32 Naskah Kerja Sama	33 Naskah Kerja Sama	38 Naskah Kerja Sama	39 Naskah Kerja Sama	39 Naskah Kerja Sama						
		AEC. 001	Rincian Output: Kerjasama dalam negeri	Pusat	15 Kesepaka tan	15 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	1.250,00	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.327,50	
		AEC. 002	Rincian Output: Kerjasama luar negeri	Pusat	17 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	20 Kesepaka tan	21 Kesepaka tan	21 Kesepaka tan	2.500,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	
		2	IKK 2: Jumlah penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan luar negeri tepat waktu		1000 Rekomen dasi	1000 Rekomen dasi	1250 Rekomen dasi	1300 Rekomen dasi	1000 Rekomen dasi						
		BAH. 001	Rincian Output: Layanan rekomendasi perjalanan luar negeri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	409,00	595,90	655,49	721,04	793,15	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada pusat fasilitasi kerja sama		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 005	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen pusat fasilitasi dan kerja sama	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	566,94	1.320,29	1.452,32	1.597,55	1.757,31	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.674,01	4.611,07	5.072,18	5.579,39	6.137,33	
6084	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal									325.368,22	1.701.292,16	1.871.421,38	2.058.563,52	2.264.419,87	Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Keuangan dan Aset, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal
		Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK 1: Jumlah unit kerja lingkup kemendagri dengan Nilai SAKIP minimal "BB"		5 Unit Kerja	6 Unit Kerja	7 Unit Kerja	8 Unit Kerja	9 Unit Kerja						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan laporan kinerja (LAKIN) untuk kementerian/ lembaga dengan jumlah di atas 6 unit	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	180,73	303,20	333,52	366,87	403,56	
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen implementasi SAKIP, manajemen kinerja dan penugasan lainnya bidang monitoring dan evaluasi lingkup Kemendagri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.376,55	1.670,06	1.837,06	2.020,77	2.222,84	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 003	Rincian Output: Penyusunan Dokumen Capaian Pelaksanaan Prioritas Kementerian dan Nasional lingkup Sekretariat Jenderal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550,00	1.125,00	1.237,50	1.361,25	1.497,38	
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian rekomendasi Area of Improvement (AOI) pada SPIP Kemendagri		75%	77%	80%	83%	85%						
		EBD. 004	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen SPIP lingkup Kemendagri	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	182,13	248,70	273,57	300,93	331,02	
		3	IKK 3: Indeks Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri		Nilai 3,1	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,5						
		EBD. 005	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Kemendagri	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270,59	239,46	263,41	289,75	318,72	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Sekretariat Jenderal		40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%						
		EBD. 006	Rincian Output: Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	300,00	330,00	363,00	399,30	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	IKK 5: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kemendagri		Nilai 93,00	Nilai 93,5	Nilai 94,00	Nilai 94,50	Nilai 95,00						
		EBD. 010	Rincian Output: Fasilitasi Perumusan Kebijakan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kemendagri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.850,00	3.030,00	3.333,00	3.666,30	4.032,93	
		EBD. 011	Rincian Output: Layanan Penyerasian Kebijakan Anggaran Kementerian Dalam Negeri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.185,00	2.880,00	3.168,00	3.484,80	3.833,28	-
		EBD. 012	Rincian Output: Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Prioritas Nasional dan Kementerian Dalam Negeri yang Mendukung Program Prioritas Presiden RI	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	4.038,58	4.442,44	4.886,69	5.375,36	
		EBD.0 13	Rincian Output: Pemberian bantuan pemerintah insentif/penghargaan pada pemerintah daerah	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.001.000,00	1.101.100,00	1.211.210,00	1.332.331,00	
		EBD. 009	Rincian Output: Fasilitasi Perumusan Kebijakan Program dan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	850,00	1.314,00	1.445,40	1.589,94	1.748,93	
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	265,00	490,00	539,00	592,90	652,19	
		6	IKK 6: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 001	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.600,00	625,00	687,50	756,25	831,88	
		7	IKK 7: Jumlah regulasi bidang perencanaan		2 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi						
		AAG. 001	Rincian Output: Permendagri mengenai Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025- 2029	Pusat	1 PerMen	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
		AAG. 002	Rincian Output: Permendagri mengenai Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Daerah lingkup Kemendagri	Pusat	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	100,00	100,00	110,00	121,00	133,10	
		Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK 1: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	850,00	505,80	556,38	612,02	673,22	
		2	IKK 2: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 008	Rincian Output: Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.401,11	1.981,11	2.179,22	2.397,14	2.636,85	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	IKK 3: Persentase layanan penyelesaian dokumen laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 007	Rincian Output: Pengelola Administrasi, Pelaporan, dan Kinerja Keuangan	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.858,89	2.809,67	3.090,64	3.399,70	3.739,67	
		4	IKK 4: Indeks Pengelolaan Aset		Nilai 3,25	Nilai 3,26	Nilai 3,27	Nilai 3,28	Nilai 3,30						
		EBA. 956	Rincian Output: Layanan BMN	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.950,00	3.078,03	3.385,83	3.724,41	4.096,85	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Keuangan dan Aset		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 002	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Keuangan dan Aset	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	940,00	2.125,40	2.337,94	2.571,73	2.828,91	
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	264.433,93	368.785,17	405.663,69	446.230,06	490.853,06	
		Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan													
		1	IKK 1: Persentase layanan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemda		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 974	Rincian Output: Layanan penyelenggaraan kearsipan	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.419,18	13.541,04	14.895,15	16.384,66	18.023,13	
		2	IKK 2: Indeks Tata Kelola Pengadaan		Nilai 91,5	Nilai 92	Nilai 92,5	Nilai 93	Nilai 93,5						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.383,43	29.791,21	32.770,33	36.047,36	39.652,10	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 003	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	500,10	2.028,62	2.231,48	2.454,63	2.700,09	
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	350 Unit	570 Unit	570 Unit	570 Unit	570 Unit	13.721,57	75.877,79	83.465,57	91.812,13	100.993,34	
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	Pusat	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4.860,00	57.337,92	63.071,71	69.378,88	76.316,77	
		Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan													
		1	IKK 1: Persentase tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketatausahaan, penyiapan materi pimpinan, dan keprotokolan		94,75%	94,80%	94,85%	94,90%	94,95%						
		EBA. 005	Rincian Output: Layanan ketatausahaan dan koordinasi tugas pimpinan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	12.834,73	92.200,26	101.420,29	111.562,32	122.718,55	
		EBA. 959	Rincian Output: Layanan protokoler	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.212,25	19.328,13	21.260,94	23.387,04	25.725,74	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pada Biro Administrasi Pimpinan												
		EBA. 004	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Administrasi Pimpinan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.153,03	14.538,02	15.991,82	17.591,00	19.350,10	
6085	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal									90.478,02	416.862,40	458.548,64	504.403,50	554.843,85	Pusat Penerangan, dan Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal
		Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK 1: Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4						
		CAN. 001	Rincian Output: Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pusat	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.847,03	6.142,71	6.756,99	7.432,68	8.175,95	
		CBT. 001	Rincian Output: Pengadaan data center	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.056,45	132.859,57	146.145,53	160.760,08	176.836,09	
		CBT. 002	Rincian Output: Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Keamanan Informasi SIPD	Pusat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	17.060,24	139.354,14	153.289,55	168.618,51	185.480,36	
		CBT. 003	Rincian Output: Pengadaan sistem keamanan	Pusat	1 Unit	-	-	-	-	8.203,11	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		FAB. 001	Rincian Output: Pengelolaan dan implementasi SI manajemen	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.370,50	1.428,92	1.571,81	1.728,99	1.901,89	
		FAB. 002	Rincian Output: Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	Pusat	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	478,72	212,89	234,17	257,59	283,35	
		FAB. 003	Rincian Output: Pengelolaan Implementasi SIPD	Pusat	10 Sistem Informasi	-	-	-	-	14.886,36	-	-	-	-	
		FAB. 004	Rincian Output: Pengelolaan Implementasi SDPDN dan SIPD HUB	Pusat	-	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	-	8.586,94	9.445,64	10.390,20	11.429,22	
		UAB. 001	Rincian Output: Optimalisasi penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	Pusat	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	47.057,07	51.762,78	56.939,06	62.632,96	
		2	IKK 2: Persentase implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	17.725,08	3.804,80	4.185,28	4.603,81	5.064,19	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Data dan Sistem Informasi		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 001	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen pusat data dan sistem informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.350,52	2.415,35	2.656,89	2.922,58	3.214,84	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian													
		1	IKK 1: Persentase opini positif pemberitaan Kementerian Dalam Negeri melalui media		70%	71%	72%	73%	73%						
		EBA. 003	Rincian Output: Layanan Komunikasi Publik Kementerian Dalam Negeri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	8.059,32	55.479,58	61.027,54	67.130,29	73.843,32	
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	437,68	1.520,42	1.672,46	1.839,71	2.023,68	
		2	IKK 2: Nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik		Nilai 90,5	Nilai 91	Nilai 91,5	Nilai 92	Nilai 92,5						
		EBA. 004	Rincian Output: Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendagri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	988,08	4.777,76	5.255,54	5.781,09	6.359,20	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
		BAH. 001	Rincian Output: Layanan pengaduan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	868,93	5.222,24	5.744,46	6.318,91	6.950,80	
		4	IKK 4: Tingkat kepuasan pengguna layanan perpustakaan		Nilai 77	Nilai 77	Nilai 77	Nilai 77	Nilai 77						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.014,00	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 002	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Pusat Penerangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.132,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	
6086	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal									21.500,01	61.547,77	67.702,55	74.472,80	81.920,08	Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas unit layanan administrasi dan konsultasi, serta implementasi reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah													
		1	IKK 1: Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi		Nilai 3	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.764,11	2.619,11	2.881,02	3.169,13	3.486,04	
		2	IKK 2: Indeks pelayanan publik		Nilai 4,62	Nilai 4,63	Nilai 4,64	Nilai 4,65	Nilai 4,66						
		BAH. 001	Rincian Output: Layanan unit layanan administrasi dan konsultasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.314,40	1.254,75	1.380,22	1.518,25	1.670,07	
		3	IKK 3: Jumlah provinsi dengan		30 Provinsi	32 Provinsi	34 Provinsi	36 Provinsi	38 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Indeks Reformasi Birokrasi meningkat												
		FBA. 001	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam implementasi kebijakan ketatalaksanaan pemda	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	542,31	857,35	943,08	1.037,39	1.141,13	
		FBA. 002	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam kelembagaan Sekretariat Daerah	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.132,68	1.516,94	1.668,63	1.835,50	2.019,05	
		FBA. 003	Rincian Output: Daerah yang difasilitasi dalam implementasi reformasi birokrasi pemda	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	860,90	1.525,62	1.678,18	1.846,00	2.030,60	
		FBA. 004	Rincian Output: Layanan administrasi dan konsultasi pemda	Pusat	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	435,60	849,74	934,71	1.028,18	1.131,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Organisasi dan Tatalaksana		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 001	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	950,00	1.376,50	1.514,15	1.665,57	1.832,12	
		Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK 1: Presentase penerapan manajemen SDM ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		90%	91%	92%	93%	94%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	6575 Orang	3831 Orang	3853 Orang	3924 Orang	4153 Orang	10.475,17	46.238,18	50.862,00	55.948,20	61.543,02	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ADG. U01	Rincian Output: Penilaian kompetensi jabatan pelaksana di lingkungan Kemendagri	Pusat	360 Orang	80 Orang	420 Orang	480 Orang	540 Orang	1.366,38	1.180,24	1.298,26	1.428,08	1.570,89	
		ADG. U02	Rincian Output: Penilaian kompetensi jabatan administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Kemendagri	Pusat	120 Orang	90 Orang	150 Orang	180 Orang	210 Orang	375,59	441,86	486,04	534,64	588,11	
		ADG. U03	Rincian Output: Penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kemendagri	Pusat	180 Orang	30 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	630,28	647,00	711,69	782,86	861,15	
		ADG. U04	Rincian Output Penilaian Kompetensi di Lingkungan Instansi Pemerintah	Pusat	-	180 Orang	150 Orang	150 Orang	180 Orang	-	395,78	435,35	478,89	526,78	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro SDM		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 002	Rincian Output: Layanan dukungan manajemen Biro SDM	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	652,59	2.644,73	2.909,21	3.200,13	3.520,14	
6088	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN									752,09	1.767,17	1.821,98	1.878,55	1.936,88	IPDN
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan legislasi dan litigasi lingkup IPDN													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kemendagri (Prosundagri)		2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AAG. S01	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	2 PerMen	120,00	447,65	185,88	191,66	197,62	
		AAH. 001	Rincian Output: Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	3 Peraturan	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	
		AAH. 002	Rincian Output: Peraturan Rektor IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	4 Peraturan	-	-	-	-	175,77	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1 Layanan	-	-	-	-	293,35	-	-	-	-	
		AAH. 003	Rincian Output: Peraturan Lainnya Terkait IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	-	425,00	438,18	451,80	465,85	
		EBA. 001	Rincian Output: Penyelenggaraan Layanan Hukum Lingkup IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	301,37	557,90	575,22	593,07	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian penanganan sengketa hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 969	Rincian Output: Layanan bantuan hukum	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	2 Layanan	-	-	-	-	42,98	-	-	-	-	
		EBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi Penyelenggaraan Perkara Lingkup IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	-	593,15	640,02	659,87	680,34	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6089	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum IPDN									518.989,16	687.851,59	814.989,57	840.254,50	865.858,81	IPDN
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup IPDN													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		ABO. 001	Rincian Output: Penyusunan Grand Design pengembangan Smart Campus IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1 Kajian	1 Kajian	-	-	-	650,00	300,00	-	-	-	
		AEA. 001	Rincian Output: Koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran lingkup IPDN	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah, Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	34 Kegiatan	-	-	-	-	2.577,28	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	1 Layanan	-	-	-	-	405,00	-	-	-	-	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Belanja Kegiatan Lingkup IPDN	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	3.170,61	3.268,93	3.370,30	3.030,98	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Papua Kab Jayapura											
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan BMN lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Provinsi Sumbar Kab. Agam, Provinsi Jabar Kab. Sumedang, Provinsi NTB Kab. Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab. Minahasa, Provinsi Sulsel Kab. Gowa, Provinsi Papua Kab. Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7.266,08	10.020,82	10.068,90	10.381,07	10.702,92	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	502.530,34	595.741,00	614.209,04	633.249,59	652.880,39	
		4	IKK 4: Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Provinsi Sumbar Kab. Agam, Provinsi Jabar Kab. Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab	4567 Unit	9615 Unit	10268 Unit	10823 Unit	11378 Unit	2.688,91	11.019,68	97.479,82	100.501,74	103.617,34	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura											
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Paket	134 Paket	57 Paket	65 Paket	72 Paket	1.000,00	64.075,44	86.329,55	89.005,80	91.765,01	
		5	IKK 5: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	1.871,56	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	3.016,04	3.125,33	3.238,00	3.354,17	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura											
6090	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN									1.101,84	1.900,22	1.959,18	2.019,97	2.082,65	IPDN
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Lingkup IPDN													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. S01	Rincian Output: Layanan kehumasan dan informasi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	371,97	458,00	472,21	486,86	501,96	
		EBA. 959	Rincian Output: Layanan protokoler	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	269,09	423,72	436,86	450,41	464,38	
		2	IKK 2: Presentase penyelesaian data/informasi lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	460,79	1.018,50	1.050,11	1.082,70	1.116,31	
6091	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN									11.088,07	21.135,53	23.142,30	23.860,04	24.599,99	IPDN
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya layanan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia lingkup IPDN													
		1	IKK 1: Persentase pemenuhan dokumen pendukung akreditasi		100%	100%	100%	100%	100%						
		ADB. 001	Rincian Output: Akreditasi institusi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	990,57	919,59	948,10	977,50	1.007,81	
		ADB. 002	Rincian Output: Akreditasi program studi	Provinsi Jawa Barat Kab. Sumedang	7 Produk	8 Produk	10 Produk	11 Produk	13 Produk	548,39	1.056,80	1.203,58	1.240,90	1.279,37	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Jumlah kerjasama/kesepakatan yang dilaksanakan oleh IPDN		15 Kesepaka tan	16 Kesepaka tan	17 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	19 Kesepaka tan						
		AEC. 001	Rincian Output: Kerjasama dalam negeri	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	14 Kesepaka tan	15 Kesepaka tan	16 Kesepaka tan	17 Kesepaka tan	18 Kesepaka tan	517,93	786,83	811,27	836,47	862,43	
		AEC.00 2	Rincian Output: Kerjasama Luar Negeri	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	554,17	3.748,56	3.864,77	3.984,58	4.108,11	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	620,20	569,67	587,38	605,63	624,44	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura											
		EBD. 965	Rincian Output: Layanan audit internal	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.856,53	1.328,94	1.370,14	1.412,62	1.456,42	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. S01	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	3.887,99	6.031,65	7.055,93	7.274,75	7.500,34	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura											
		EBC. 001	Rincian Output: Layanan Kepegawaian Lingkup IPDN	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	-	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	-	2.849,08	3.337,45	3.440,95	3.547,65	
		5	IKK 5: Presentase penyelesaian rencana mitgasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup IPDN		40%	45%	50%	55%	60%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 003	Rincian Output: Layanan manajemen risiko lingkup IPDN	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	198,99	289,44	298,45	307,73	317,32	
		6	IKK 6: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup IPDN		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan monitoring program kegiatan dan anggaran pendidikan IPDN	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa,	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	1.707,82	1.432,75	1.477,21	1.523,04	1.570,28	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura											
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan penjaminan mutu internal	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.353,41	1.395,37	1.438,63	1.483,23	
		EBD. S02	Rincian Output: Dokumen pemantauan dan evaluasi	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	205,48	229,32	236,43	243,76	251,32	
		FAE. 001	Rincian Output: Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan lulusan IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	539,49	556,22	573,48	591,27	
6092	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN									86.324,45	105.405,25	157.288,77	162.165,24	167.192,91	IPDN
		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pendidikan kepamongprajaan yang berkualitas													
		1	IKK 1: Persentase lulusan program pascasarjana (S2 dan S3) dengan Predikat Cumlaude		6%	7%	8%	9%	10%						
		DBA. 001	Rincian Output: Layanan pendidikan program pascasarjana	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	8.640,88	11.998,37	12.144,55	12.521,05	12.909,21	
		2	IKK 2: Persentase lulusan program vokasi (D-IV) dengan Predikat Cumlaude		23%	24%	25%	26%	27%						
		EBC. 001	Rincian Output: Layanan penerimaan praja IPDN	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	1061 Orang	1410 Orang	1410 Orang	1410 Orang	1410 Orang	16.867,65	20.305,00	20.934,47	21.583,45	22.252,56	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBC. 968	Rincian Output: Layanan pendidikan kedinasan	Provinsi Sumbar Kab Agam, Provinsi Jabar Kab Sumedang, Provinsi NTB Kab Lombok Tengah, Provinsi Kalbar Kab Mempawah , Provinsi Sulut Kab Minahasa, Provinsi Sulsel Kab Gowa, Provinsi Papua Kab Jayapura	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan	51.552,85	61.316,62	111.911,23	115.380,92	118.958,19	
		3	IKK 3: Jumlah hasil penelitian yang dipublikasi		70 Publikasi	75 Publikasi	80 Publikasi	85 Publikasi	90 Publikasi						
		ABL. 001	Rincian Output: Monitoring dan rencana aksi penelitian dan pengabdian masyarakat	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	-	6 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	-	545,00	561,91	579,34	597,31	
		ABL. S01	Rincian Output: Publikasi bereputasi nasional hasil riset dan inovasi	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	20 Publikasi Nasional	21 Publikasi Nasional	22 Publikasi Nasional	23 Publikasi Nasional	24 Publikasi Nasional	4.471,07	5.520,00	5.691,12	5.867,55	6.049,45	
		ABL. S03	Rincian Output: Naskah kebijakan aktual strategis	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	3 Kajian	5 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	112,88	500,00	515,52	531,51	548,00	
		4	IKK 4: Jumlah pengabdian masyarakat		17 PKM	18 PKM	19 PKM	20 PKM	21 PKM						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ABL. 005	Rincian Output: Pengabdian masyarakat	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	17 Rekomen dasi Kebijakan	18 Rekomen dasi Kebijakan	19 Rekomen dasi Kebijakan	20 Rekomen dasi Kebijakan	21 Rekomen dasi Kebijakan	2.644,98	3.156,51	3.254,37	3.355,27	3.459,30	
		5	IKK 5: Persentase lulusan program pendidikan profesi kepamongprajaan dengan Predikat Cumlaude		29%	30%	31%	32%	33%						
		DBA. 002	Rincian Output: Layanan pendidikan program profesi kepamongprajaan	Provinsi Jawa Barat Kab Sumedang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	2.034,15	2.063,75	2.275,60	2.346,15	2.418,89	
6093	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah									200,00	600,00	660,00	660,00	200,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi lingkup Inspektorat Jenderal													
		1	IKK 1: Jumlah regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		1 Regulasi	3 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	1 Regulasi						
		AAC. 001	Rincian Output: Peraturan Pemerintah tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat	-	-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	460,00	460,00	-	
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri terkait perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat	1 PerMen	3 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	1 PerMen	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6094	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah									60.814,74	72.577,04	75.420,87	78.620,87	82.200,87	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup Inspektorat Jenderal													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan BMN lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	706,19	706,18	706,18	706,18	706,18	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	57.228,02	64.039,48	66.280,00	69.000,00	72.000,00	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	776,25	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	Pusat	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	776,25	1.200,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan laporan kinerja Satuan kerja eselon I tanpa satuan kerja vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19,03	19,79	19,79	19,79	19,79	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)												
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan kerja Eselon I tanpa satuan kerja vertikal Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	56,87	59,01	59,01	59,01	59,01	
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	227,70	136,69	140,00	170,00	200,00	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175,40	207,90	207,90	207,90	207,90	
		6	IKK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	849,05	508,00	508,00	508,00	508,00	
6095	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah									372,74	713,78	730,00	745,00	800,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Inspektorat Jenderal												
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	51,75	392,80	400,00	425,00	450,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Inspektorat Jenderal		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	320,99	320,99	330,00	320,00	350,00	
6096	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah									1.675,62	2.673,79	2.705,00	2.825,00	2.970,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM lingkup Inspektorat Jenderal													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	326,24	324,80	330,00	335,00	350,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup Inspektorat Jenderal		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	317 Orang	290 Orang	290 Orang	290 Orang	290 Orang	1.178,61	1.698,68	1.700,00	1.750,00	1.800,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Inspektorat Jenderal		40%	45%	50%	55%	60%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		AEC. 001	Rincian Output: Layanan fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengawasan	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	170,78	595,31	600,00	650,00	700,00	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko	Pusat	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	55,00	75,00	90,00	120,00	
6097	Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD									1.190,25	1.682,97	1.500,00	1.625,00	1.650,00	Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapabilitas PPUPD secara nasional													
		1	IKK 1: Tingkat kapasitas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) secara nasional		Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,4)	Level 3 (3,5)						
		FAC. 001	Rincian Output: Penguatan kapasitas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Pusat	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	621,00	1.492,77	1.500,00	1.625,00	1.650,00	
		ADG. 001	Rincian Output: Standarisasi Hasil Kerja PPUPD Inspektorat	Pusat	2514 Orang	-	-	-	-	569,25	-	-	-	-	
		2	IKK 2: Jumlah regulasi pembinaan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) nasional		-	1 Regulasi	-	-	-						
		AAG. 001	Rincian Output: Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Jabatan Fungsional Pengawas	Pusat	-	1 PerMen	-	-	-	-	190,20	-	-	-	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)												
6098	Kegiatan: Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus									20.147,39	57.658,43	59.139,08	61.599,08	63.999,08	Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Khusus, dan Inspektorat Jenderal
		Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah, serta peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah													
		1	IKK 1: Tingkat kapasitas Inspektorat Daerah		Nilai 82	Nilai 84	Nilai 86	Nilai 88	Nilai 90						
		FAI.001	Rincian Output: Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah	Pusat	-	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerintah Daerah		23.528,52	23.528,52	23.528,52	23.528,52	
		2	IKK 2: Jumlah daerah dengan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pada Cluster I		360 Daerah	360 Daerah	360 Daerah	360 Daerah	360 Daerah						
		BIE. 009	Rincian Output: Pengelolaan bersama pelaksanaan <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSP) Kemendagri	Pusat	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerintah Daerah	1.769,92	1.666,42	1.700,00	1.770,00	2.000,00	
		3	IKK 3: Jumlah daerah dengan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah berkategori "Baik"		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BIE. 001	Rincian Output: Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Inspektorat Jenderal	Pusat	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerintah Daerah	7.295,09	11.470,92	12.000,00	13.500,00	14.500,00	
		FBA. 001	Rincian Output: Koordinasi pembinaan pemerintahan daerah	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.687,40	2.532,78	2.630,00	2.675,00	3.000,00	
		BIE. 005	Rincian Output: Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup khusus	Pusat	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerinta h Daerah	8 Pemerinta h Daerah	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerintah Daerah	1.242,00	1.242,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00	
		FAI.002	Rincian Output: Pembangunan integritas lingkup Kemendagri dan Pemda	Pusat	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	313,88	519,39	550,00	575,00	600,00	
		FAE. 001	Rincian Output: Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Pusat	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		240,00	240,00	260,00	280,00	
		4	IKK 4: Jumlah provinsi dengan nilai evaluasi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) berkategori "Baik"		10 Provinsi	13 Provinsi	15 Provinsi	18 Provinsi	20 Provinsi						
		FBA. 002	Rincian Output: Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	Pusat	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerin tah Daerah	38 Pemerintah Daerah	38 Pemerintah Daerah	1.060,00	8.930,83	9.500,00	9.750,00	10.000,00	
		5	IKK 5: Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan dan pengawasan internal serta pemeriksaan khusus		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001	Rincian Output: Pemeriksaan internal lingkup Inspektorat Jenderal	Pusat	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2.095,14	2.100,00	2.250,00	2.400,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 005	Rincian Output: Pengawasan internal lingkup Inspektorat Jenderal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.392,23	4.164,44	4.300,00	4.500,00	4.700,00	
		EBD. 009	Rincian Output: Penanganan pemeriksaan khusus Kemendagri dan BNPP	Pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	177,43	177,43	250,00	350,00	450,00	
		6	IKK 6: Persentase penyelesaian hasil audit kinerja oleh UKE I		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 011	Rincian Output: Layanan audit kinerja Inspektorat Jenderal	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	
		EBD. 012	Rincian Output: Layanan audit kinerja Sekretariat Jenderal	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36,20	36,20	36,20	36,20	36,20	
		EBD. 013	Rincian Output: Layanan audit kinerja DKPP	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11	
		EBD. 014	Rincian Output: Layanan audit kinerja IPDN	Pusat	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	848,99	725,32	725,32	725,32	725,32	
		EBD. 015	Rincian Output: Layanan audit kinerja BPSDM	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	
		EBD. 016	Rincian Output: Layanan audit kinerja Ditjen Otda	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	
		EBD. 017	Rincian Output: Layanan audit kinerja BSKDN	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27,98	27,98	27,98	27,98	27,98	
		EBD. 018	Rincian Output: Layanan audit kinerja BNPP	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	
		EBD. 019	Rincian Output: Layanan audit kinerja Ditjen Bina Pemdes	Pusat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum												
		1 IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga, dan BMN lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 956 Rincian Output: Layanan BMN	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
		EBA. 962 Rincian Output: Layanan umum	Pusat	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	4.150,00	5.000,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	
		2 IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994 Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	50.239,82	61.877,75	51.638,62	51.638,62	51.638,62	
		3 IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951 Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	178 Unit	137 Unit	189 Unit	189 Unit	189 Unit	1.500,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		4 IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001 Rincian Output: Dokumen RKA satuan kerja Eselon I tanpa satuan kerja vertikal (SBKU)	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.541,73	2.000,00	2.541,07	2.541,07	3.000,00	
		5	IKK 5: Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 002	Rincian Output: Dokumen laporan kinerja satuan kerja Eselon I tanpa satuan kerja vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,30	17,30	17,30	17,30	173,00	
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		6	IKK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan UKE I	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.500,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 003	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan UKE I	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	2.692,00	1.892,00	2.042,00	2.192,00	
		7	IKK 7: Jumlah daerah yang dilakukan pembinaan dalam penanganan dinamika politik		38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi						
		FBA. 001	Rincian Output: Pembinaan teknis politik dan pemerintahan umum	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	4.400,00	3.799,90	6.500,00	8.000,00	8.000,00	
6101	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum									2.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Sekretariat Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		-	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6102	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum									1.900,00	4.000,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00	Sekretariat Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.000,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	287 orang	287 orang	287 orang	287 orang	287 orang	700,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,00	1.000,00	400,00	500,00	600,00	
6103	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah									1.965,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi bidang administrasi wilayah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.965,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6104	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah								65.908,34	89.660,04	102.808,73	113.089,59	124.398,56	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		Sasaran kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum bidang administrasi wilayah												
		1 IKK 1: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001 Rincian Output: Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) satker eselon I tanpa satker vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,70	51,70	62,56	68,81	75,69	
		EBD. 002 Rincian Output: Dokumen LAKIN satker eselon I tanpa satker vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,30	808,30	889,13	978,04	1.075,85	
		EBD. 952 Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	631,20	810,40	891,44	980,58	1.078,64	
		2 IKK 2: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953 Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240,00	240,00	814,00	895,40	984,94	
		EBD. 003 Rincian Output: Layanan analisis monitoring dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	-	-	-	-	268,80	-	-	-	-	
		3 IKK 3: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan												
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan Ditjen Bina Adwil	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.800,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 011	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan Ditjen Bina Adwil	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	5.492,00	1.670,00	1.887,80	2.127,38	
		4	IKK 4: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan Sarana Internal	Pusat	121 Unit	121 Unit	121 Unit	121 Unit	121 Unit	2.900,00	4.190,00	3.509,00	3.859,90	4.245,89	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	54.841,22	69.603,70	87.512,60	96.263,86	105.890,25	
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	5.158,12	7.955,94	6.952,00	7.647,20	8.411,92	
6105	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah									1.362,00	6.158,30	1.648,02	1.812,82	1.994,11	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik bidang administrasi wilayah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian permohonan informasi publik dan layanan pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	350,00	385,00	423,50	465,85	512,44	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		1 Data/ Informasi Terstruktur	1 Data/ Informasi Terstruktur	1 Data/ Informasi Terstruktur	1 Data/ Informasi Terstruktur	1 Data/ Informasi Terstruktur						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.012,00	5.773,30	1.224,52	1.346,97	1.481,67	
6106	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah									1.900,00	2.090,00	2.299,00	2.528,90	2.781,79	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
		Sasaran kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM bidang administrasi wilayah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	700,00	770,00	847,00	931,70	1.024,87	
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM		275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	900,00	990,00	1.089,00	1.197,90	1.317,69	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 961	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,00	330,00	363,00	399,30	439,23	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6107	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa									1.000,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Balai Pemerintahan Desa
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.000,00	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6108	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa									112.050,68	159.187,26	129.516,24	134.363,16	137.182,29	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Balai Pemerintahan Desa
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa													
		1	IKK 1: Persentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum		2 Layanan	1 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	1.076,49	1.672,60	1.462,17	1.467,72	1.473,53	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran		8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	102.805,99	137.886,10	110.333,57	113.384,84	116.557,86	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal		121 Unit	183 Unit	183 Unit	203 Unit	223 Unit	1.537,79	3.319,00	3.645,00	4.400,00	3.000,00	
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal		5 Unit	1 Unit	6 Unit	7 Unit	8 Unit	1.004,32	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		4	IKK 4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan Manajemen Keuangan		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.605,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.649,82	5.377,00	5.512,00	5.652,00	
		5	IKK 5 : Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.250,00	36,00	2.790,50	3.090,60	3.390,90	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan kebijakan program dan belanja kegiatan lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.351,09	3.575,74	1.750,00	2.000,00	2.250,00	
		6	IKK 6: Persentase penyelesaian dokumen hasil		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa												
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	420,00	540,00	1.150,00	1.500,00	1.850,00	
6109	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa									3.466,82	9.460,92	6.600,00	8.200,00	9.800,00	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Balai Pemerintahan Desa
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik bidang pemerintahan desa lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	416,82	3.590,81	600,00	700,00	800,00	
		EBA. 959	Rincian Output: Layanan protokoler	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.550,00	3.870,11	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.500,00	2.000,00	3.500,00	4.500,00	5.500,00	
6110	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa									2.294,92	2.587,00	4.101,12	4.301,12	4.401,12	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Balai Pemerintahan Desa

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM bidang pemerintahan desa lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal		3 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	275,00	416,00	1.461,25	1.511,25	1.511,25	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)		205 Orang	594 Orang	168 Orang	168 Orang	168 Orang	1.019,92	1.960,00	1.639,87	1.789,87	1.889,87	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang di tindaklanjuti lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko Ditjen Bina Pemerintahan Desa		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000,00	211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6111	Kegiatan: Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah									6.213,67	7.500,00	19.500,00	21.500,00	22.500,00	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan dukungan pelaksanaan tugas khusus lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah													
		1	IKK 1: Persentase layanan fasilitasi pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		100%	100%	100%	100%	100%						
		FBA. 001	Rincian Output: Fasilitasi pelaporan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.000,00	3.000,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00	
		2	IKK 2: Persentase layanan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)		100%	100%	100%	100%	100%						
		FBA. 002	Rincian Output: Fasilitasi pelaporan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian layanan koordinasi isu aktual strategis pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		FBA. 003	Rincian Output: Fasilitasi koordinasi isu aktual strategis pembangunan daerah	Pusat	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ / Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.213,67	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	
6112	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah									1.700,00	2.000,00	2.700,00	3.200,00	3.700,00	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah													
		1	IKK: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan Hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.700,00	2.000,00	2.700,00	3.200,00	3.700,00	
6113	Kegiatan: Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah									74.976,11	127.527,67	83.315,88	85.815,88	88.315,88	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan BMN lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 956	Rincian Output: Layanan BMN	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	139,00	139,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan Umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.442,00	2.861,00	3.400,00	3.900,00	4.400,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan Perkantoran	Pusat	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	66.707,11	95.264,87	70.046,88	70.046,88	70.046,88	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan Sarana Internal	Pusat	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	169,00	13.621,81	900,00	1.400,00	1.900,00	
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan Prasarana Internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.500,00	11.410,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	551,70	500,00	551,70	551,70	551,70	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,30	31,00	17,30	17,30	17,30	
		6	IKK 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen Keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.500,00	508,00	508,00	508,00	508,00	

[illegible]

[illegible]

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA.9 57	Rincian Output: Layanan hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.200,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
6117	Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah									68.265,26	71.317,238	72.814,30	75.614,30	78.014,30	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup Ditjen Otonomi Daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 956	Rincian Output: Layanan BMN	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.844,00	2.704,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	60.050,50	62.822,90	62.000,00	64.000,00	65.000,00	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	1 Unit	158 Unit	158 Unit	158 Unit	158 Unit	980,00	1.448,54	1.100,00	1.200,00	1.300,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.494,46	2.764,50	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan Evaluasi lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240,00	480,00	250,00	250,00	250,00	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Satuan Kerja (Satker) Eselon I tanpa Satuan Kerja (Satker) vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	
		6	IKK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan Manajemen keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.500,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	433,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	
6118	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah									748,50	585,465	1.500,00	1.700,00	2.000,00	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik lingkup Ditjen Otonomi Daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian permohonan informasi publik dan pengaduan masyarakat lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	241,50	240,00	300,00	400,00	500,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	507,00	345,465	1.200,00	1.300,00	1.500,00	
6119	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah									1.525,50	2.223,91	3.400,00	4.100,00	5.000,00	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM lingkup Ditjen Otonomi Daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola Internal lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	336,20	552,48	1.200,00	1.300,00	1.500,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	270 Orang	270 Orang	270 Orang	270 Orang	270 Orang	708,90	1.171,43	1.200,00	1.300,00	1.500,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480,40	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
6120	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil									2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	3.660,25	Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	3.660,25	
6121	Kegiatan: Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil									83.599,93	161.274,08	101.073,30	111.141,30	122.215,30	Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Sipil
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan BMN lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 956	Rincian Output: Layanan BMN	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	6.751,98	7.427,00	8.170,00	8.987,00	9.886,00	
		EBD. 974	Rincian Output: Layanan penyelenggaraan kearsipan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	577,77	636,00	699,00	769,00	846,00	
		EBA. 001	Rincian Output: Layanan koordinasi penyelesaian aset Dukcapil di daerah	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.974,51	3.273,00	3.600,00	3.960,00	4.356,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	53.905,58	79.723,63	65.226,00	71.748,00	78.923,00	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	58 Unit	60 Unit	62 Unit	64 Unit	66 Unit	3.047,50	14.452,00	3.687,00	4.056,00	4.462,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	Pusat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	780,00	40.558,00	944,00	1.038,00	1.142,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	552,50	552,50	552,50	552,50	552,50	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan koordinasi isu aktual lingkup Ditjen Dukcapil	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	9.499,20	8.929,65	11.609,50	12.826,50	14.163,50	
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		6	IKK 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.000,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 003	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	2.492,00	3.122,00	3.485,00	3.884,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7	IKK 7: Jumlah peralatan KTP-el kabupaten, kota dan kecamatan yang dilakukan pemeliharaan		50 Unit	55 Unit	60 Unit	65 Unit	70 Unit						
		CDS. 001	Rincian Output: Pemeliharaan perangkat KTP-el	Pusat	50 Unit	55 Unit	60 Unit	65 Unit	70 Unit	2.114,60	2.326,00	2.559,00	2.815,00	3.096,00	
6122	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil									2.347,24	2.955,85	2.840,00	3.124,00	3.436,00	Sekretariat Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 959	Rincian Output: Layanan protokoler	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	347,24	382,00	420,00	462,00	508,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.000,00	2.573,85	2.420,00	2.662,00	2.928,00	
6123	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil									14.495,16	5.081,90	5.289,00	5.519,00	5.770,00	Sekretariat Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Sipil
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.774,65	1.402,00	1.542,00	1.697,00	1.866,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan SDM lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	12.620,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Ditjen Dukcapil	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	679,90	747,00	822,00	904,00	
6124	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah									750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi bidang keuangan daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan hukum lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Layanan hukum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	750,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6125	Kegiatan: Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah									62.009,16	71.131,92	82.081,92	97.871,27	107.650,24	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, dan Umum bidang keuangan daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 956	Rincian Output: Layanan Barang Milik Negara	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.061,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	57.166,66	63.700,42	73.700,42	89.158,42	98.074,26	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	70 Unit	74 Unit	78 Unit	82 Unit	86 Unit	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	552,50	552,50	552,50	552,50	552,50	
		EBD. 001	Rincian Output: Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	500,00	1.000,00	1.131,35	1.544,49	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		6	IKK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	850,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 002	Rincian Output: Dokumen Manajemen Keuangan	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	492,00	692,00	892,00	1.092,00	
6126	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah									931,84	1.196,31	1.374,32	1.474,32	1.574,32	Sekretariat Ditjen Bina

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Keuangan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik bidang keuangan daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan kehumasan dan protokoler lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 958	Rincian Output: Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	458,00	380,00	458,00	458,00	458,00	
		2	IKK 2: Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	473,84	816,31	916,32	1.016,32	1.116,32	
6127	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah									1.400,00	1.750,00	2.444,00	2.613,40	2.799,74	Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan Sumber Daya Manusia bidang keuangan daerah													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	690,00	500,00	847,00	931,70	1.024,87	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan Sumber Daya Manusia lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	700,00	500,00	847,00	931,70	1.024,87	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang di tindaklanjuti lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah		40%	45%	50%	55%	60%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Ditjen Bina Keuda	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
6128	Kegiatan: Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri									175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya layanan legislasi dan litigasi lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri													
		1	IKK : Persentase penyelesaian layanan rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 957	Rincian Output: Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	
6129	Kegiatan: Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri									46.223,34	59.877,26	55.733,36	56.004,21	61.178,08	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum Dan Pemdagri; Pusat Strategi

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															Kebijakan Kewilayahan Kependudukan Dan Pelayanan Publik; Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah Dan Desa; Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi, Dan Inovasi Pemdagri; Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, dan Umum lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan Barang Milik Negara lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.825,00	2.556,11	2.589,21	2.589,21	3.000,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Badan Strategi		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri												
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	41.339,44	54.564,90	48.008,18	48.008,18	52.400,00	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat	25 Unit	-	34 Unit	34 Unit	34 Unit	512,50	-	1.502,00	1.502,00	1.502,00	
		EBB. 971	Rincian Output: Layanan prasarana internal	Pusat	16 Unit	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	450,00	-	450,00	450,00	450,00	
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001	Rincian Output: Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I tanpa Satker Vertikal	Pusat	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	565,98	565,98	685,98	785,98	985,98	
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	82,88	82,88	200,00	250,00	300,00	
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri												
		EBD. 002	Rincian Output: Dokumen laporan kinerja satuan kerja - eselon I tanpa satker vertikal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27,54	17,30	27,55	27,55	27,55	
		EBD. 003	Rincian Output: Dokumen pemantauan dan evaluasi	Pusat	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	280,00	320,00	480,00	580,00	680,00	
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
		6	IKK 6: Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	900,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
		EBD. 004	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Pusat	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	1.022,10	1.042,44	1.063,29	1.084,55	
6130	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri									20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri													
		1	IKK : Jumlah data/informasi lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kementerian Dalam Negeri												
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
6131	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri									1.350,00	1.522,68	2.597,85	2.697,85	2.797,85	Sekretariat BSKDN
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan Sumber Daya Manusia bidang strategi kebijakan													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.050,00	1.071,60	2.097,85	2.097,85	2.097,85	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan Pendidikan dan Pelatihan lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 996	Rincian Output: Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	200,00	351,08	400,00	500,00	600,00	
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang di tindaklanjuti lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri		40%	45%	50%	55%	60%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian layanan umum, rumah tangga dan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 962	Rincian Output: Layanan umum	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	1.865,00	4.020,00	5.165,00	7.665,00	9.515,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan perkantoran lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EBA. 994	Rincian Output: Layanan perkantoran	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sume dang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Kota Yogyakarta), Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	144.617,13	172.721,29	183.104,55	186.615,85	192.171,37	
		3	IKK 3: Persentase pengadaan sarana dan prasarana lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBB. 951	Rincian Output: Layanan sarana internal	Pusat, Provins Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi	342 Unit	301 Unit	303 Unit	301 Unit	303 Unit	3.972,09	110.375,00	89.903,86	109.178,86	125.528,86	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)											
		4	IKK 4: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		AEA. 051	Rincian Output: Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri	Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.036,96	2.946,01	1.150,00	1.200,00	1.300,00	
		AEA. 052	Rincian Output: Koordinasi dan kerjasama bidang SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (RM)	Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,00	500,00	350,00	400,00	420,00	
		AEA. 053	Rincian Output: Koordinasi dan Kerjasama bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan dalam negeri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		AEA. 054	Rincian Output: Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi aparatur	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			pemerintahan dalam negeri (PNBP)	Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)											
		EBD. 002	Rincian Output: Layanan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Unit Eselon I dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) 6	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	137,75	200,00	250,00	300,00	
		EBD. 952	Rincian Output: Layanan perencanaan dan penganggaran	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi),	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	755,75	303,87	1.180,75	1.180,75	1.180,75	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)											
		5	IKK 5: Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 953	Rincian Output: Layanan pemantauan dan evaluasi	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.035,00	1.480,00	1.350,00	1.420,00	1.690,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6	IKK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96	Nilai 96						
		EBD. 955	Rincian Output: Layanan manajemen keuangan	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.370,00	591,00	591,00	591,00	591,00	
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan pengelolaan keuangan	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	-	2.149,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar)											
6134	Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									1.200,00	2.500,00	2.100,00	2.700,00	3.300,00	Sekretariat BPSDM
		Sasaran Kegiatan: Tereleaksikannya pengelolaan komunikasi dan informasi publik lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
		1	IKK 1: Jumlah data/informasi lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data						
		EBA. 963	Rincian Output: Layanan data dan informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	800,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan integrasi sistem informasi		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 965	Rincian Output: Layanan integrasi sistem informasi	Pusat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	400,00	1.500,00	600,00	700,00	800,00	
6135	Kegiatan: Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia									1.250,00	3.378,00	3.178,00	3.378,00	3.528,00	Sekretariat BPSDM

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya pengelolaan organisasi dan SDM lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
		1	IKK 1: Persentase penyelesaian pelayanan organisasi dan tata kelola internal lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBA. 960	Rincian Output: Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,00	700,00	550,00	700,00	750,00	
		2	IKK 2: Persentase penyelesaian layanan Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBC. 954	Rincian Output: Layanan manajemen SDM	Pusat, Provinsi Jawa Barat (Kab Sumedang), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta) , Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi), Provinsi Jawa Barat (Kab Bogor), Provinsi Sulawesi	509 Orang	617 Orang	572 Orang	586 Orang	690 Orang	1.000,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR /RINCIAN OUTPUT		LOKASI	TARGET DAN SATUAN					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Selatan (Kota Makassar)											
		3	IKK 3: Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%	100%	100%	100%	100%						
		EBD. 001	Rincian Output: Layanan penyusunan dokumen manajemen risiko lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	Pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00	200,00	150,00	200,00	300,00	

b. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1233.QDC.001 - Fasilitasi penguatan nasionalisme bagi generasi muda dalam menggelorakan nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa		500 Orang	4000 Orang	800 Orang	1000 Orang	800 Orang	500,00	4.000,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00	-	-	-	-	-	500,00	4.000,00	2.100,00	2.500,00	2.100,00
1233.UAC.001 - Fasilitasi revitalisasi dan aktualisasi nilai- nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI bagi aparatur		180 Orang	3000 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	900,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	900,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1233.UBA.001 - Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika.		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1233.UBA.002 - Fasilitasi pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama, penghayat kepercayaan, ras, dan golongan		5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1233.UBA.003 - Fasilitasi penguatan karakter dan wawasan kebangsaan dalam membangun harmoni kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
1233.UBA.004 - Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di daerah melalui tim terpadu		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.200,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	1.200,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
1234.UAC.001 -		200	600	400	400	400	2.000,00	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-	-	-	-	-	2.000,00	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kapasitas aparaturnya pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang															
1237.PBL.001 - Rekomendasi pelaksanaan model ideal kewenangan dan kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP)		1 Rekomen dasi Kebijakan	3 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.000,00	5.426,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	5.426,80	-	-	-
1237.UBA.001 - Daerah yang memiliki angka Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori "Sangat Baik"		17 Provinsi	15 Provinsi	20 Provinsi	25 Provinsi	30 Provinsi	112.500,00	40.642,69	300.000,00	500.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	112.500,00	40.642,69	300.000,00	500.000,00	700.000,00
1237.UBA.002 - Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal		40 Daerah (Kumulatif)	207 Daerah (Kumulatif)	314 Daerah (Kumulatif)	401 Daerah (Kumulatif)	508 Daerah (Kumulatif)	1.900,00	2.900,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	1.900,00	2.900,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
1237.UBA.003 - Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik		5 Provinsi	17 Provinsi	24 Provinsi	31 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1237.UBA.004 - Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan		1 Wilayah Metropolitan	4 Wilayah Metropolitan	6 Wilayah Metropolitan	8 Wilayah Metropolitan	10 Wilayah Metropolitan	1.200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	1.200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1237.UBA.005 - Daerah yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam perizinan berusaha		38 Daerah (Prov/Kab/Kota)	136 Daerah (Prov/Kab/Kota)	136 Daerah (Prov/Kab/Kota)	117 Daerah (Prov/Kab/Kota)	118 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.600,00	1.000,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00	-	-	-	-	-	1.600,00	1.000,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1237.UBA.006 - Daerah yang dikuatkan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	143 Daerah (Prov/Kab /Kota)	143 Daerah (Prov/Kab /Kota)	123 Daerah (Prov/Kab /Kota)	126 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1237.UBA.007 - Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)		-	155 Daerah (Prov/Kab /Kota)	155 Daerah (Prov/Kab /Kota)	117 Daerah (Prov/Kab /Kota)	118 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.405,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	1.405,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
1237.UBA.008 - Fasilitasi penguatan terhadap tata kelola koperasi merah putih kelurahan/desa		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	3.575,17	7.232,69	7.955,96	8.751,56	-	-	-	-	-	-	3.575,17	7.232,69	7.955,96	8.751,56
1241.PBL.001 - Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah		5 Rekomendasi Kebijakan	50 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.000,00	6.000,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	-	-	-	-	-	1.000,00	6.000,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
1241.PBL.002 - Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi		-	9 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	9 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	-	3.000,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00
1241.PEC.001 - Penguatan kerja sama pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya		1 Kesepakatan/Hasil perundingan	2 Kesepakatan/Hasil perundingan	2 Kesepakatan/Hasil perundingan	2 Kesepakatan/Hasil perundingan	2 Kesepakatan/Hasil perundingan	2.000,00	11.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20	-	-	-	-	-	2.000,00	11.200,00	2.420,00	2.662,00	2.928,20
1241.PEC.002 - Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharaan batas negara		2 Kesepakatan/Hasil perundingan	3 Kesepakatan/Hasil perundingan	3 Kesepakatan/Hasil perundingan	3 Kesepakatan/Hasil perundingan	3 Kesepakatan/Hasil perundingan	1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	-	-	-	-	-	1.500,00	1.650,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1241.PEC.003 - Kementerian/lembaga yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau		12 Kesepaka tan	16 Kesepaka tan (Akumula si)	20 Kesepaka tan (Akumula si)	24 Kesepaka tan (Akumula si)	30 Kesepaka tan (Akumula si)	2.400,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.400,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
1241.UBA.001 - Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas kementerian/lembaga secara terpadu di wilayah metropolitan		3 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropolit an	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	1.000,00	2.750,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.750,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1241.UBA.002 - Daerah yang dikuatkan tata kelola smart city-nya di wilayah metropolitan		3 Wilayah Metropol itan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropol itan	1.500,00	3.000,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00	-	-	-	-	-	1.500,00	3.000,00	1.800,00	1.950,00	2.100,00
1241.UBA.003 - Daerah yang dimediasi dan di advokasi dalam penerapan peraturan pemerintah (PP) perkotaan pada wilayah metropolitan		3 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	10 Wilayah Metropoli tan	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
1241.UBA.004 - Penataan kewilayahan dalam Negeri dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1241.UBA.005 - Penataan kewilayahan kawasan perbatasan dan wilayah metropolitan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.000,00	2.600,00	2.810,00	3.031,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.600,00	2.810,00	3.031,00
1241.UBA.006 - Fasilitasi Administrasi kewilayahan dalam rangka implementasi kegiatan 3 juta rumah		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.200,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1244.UAB.001 - Sistem informasi desa berbasis Profil Desa dan Kelurahan/ Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Prodeskel/Epdeskel) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-	-
1244.UBB.001 - Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa		90 Desa	600 Desa	800 Desa	800 Desa	800 Desa	850,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	850,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1244.UBB.002 - Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital		50 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	1.500 Desa	1.500 Desa	850,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	850,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1244.UBB.003 - Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital		100 Desa	20.000 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	2.000 Desa	850,00	6.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	-	-	-	-	-	850,00	6.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
1244.UBB.004 - Desa yang memanfaatkan Learning Management System (LMS) dalam pembelajaran digital dalam peningkatan kapasitas aparatur/pengurus kelembagaan desa		100 Desa	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
1244.UBB.005 - Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Profil Desa dan Kelurahan/Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Prodeskel/Epdeskel) dalam Perencanaan dan Pelaporan		-	20.000 Desa	5.000 Desa	10.000 Desa	15.000 Desa	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1244.UBB.006 - Desa yang telah tertib		125 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1000 Desa	1.000,00	2.000,00	6.600,00	7.400,00	8.200,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	6.600,00	7.400,00	8.200,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
administrasi pengelolaan aset desa																					
1244.UBB.007 - Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa		-	-	150 Desa	175 Desa	200 Desa	-	-	6.500,00	8.000,00	10.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00	8.000,00	10.000,00
1244.UBB.008 - Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional		-	500 Desa	550 Desa	600 Desa	650 Desa	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00
1244.UBB.009 - Desa yang telah memiliki peta batas desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Peta Batas Desa		457 Desa	1500 Desa	1500 Desa	1000 Desa	800 Desa	15.309,35	33.440,00	48.640,00	33.440,00	21.170,66	-	-	-	-	-	15.309,35	33.440,00	48.640,00	33.440,00	21.170,66
1244.UBB.010 - Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		1.500 Desa	2.100 Desa	1.250 Desa	1.100 Desa	-	1.961,52	2.149,38	1.799,38	1.664,53	-	-	-	-	-	-	1.961,52	2.149,38	1.799,38	1.664,53	-
1244.UBB.011 - Desa yang difasilitasi dalam pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih		-	1.552 Desa	2.000 Desa	2.500 Desa	3.000 Desa	-	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
1244.UBB.012 - Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama koperasi desa/ kelurahan merah putih		-	5.000 Desa	5.500 Desa	6.000 Desa	6.500 Desa	-	1.000,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00
1248.UAC.004 - Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional		3.060 Orang	5.760 Orang	6.000 Orang	6.090 Orang	5.850 Orang	13.500,00	39.099,16	40.825,00	41.275,00	39.847,00	-	-	-	-	-	13.500,00	39.099,16	40.825,00	41.275,00	39.847,00
1248.UBB.001 - Desa yang memanfaatkan Learning Management System (LMS) dalam		100 Orang	20.000 Desa	20.000 Desa	20.000 Desa	20.000 Desa	650,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	650,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
pembelajaran digital dalam peningkatan kapasitas aparatur/ pengurus kelembagaan desa																					
1254.PBL.001 - Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat		-	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	38 Rekomen dasi Kebijakan	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
1254.UAB.001 - Optimalisasi penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah		1 Sistem Informasi	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-	-
1254.UBA.001 - Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	4.600,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	-	-	-	-	-	-	4.600,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1254.UBA.002 - Daerah yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
1259.PAC.001 - Rancangan peraturan pemerintah mengenai kawasan aglomerasi		-	1 RPP	1 RPP	-	-	-	520,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	520,00	520,00	-	-
1259.PBL.001 - Rekomendasi kebijakan penyelesaian sengketa di Daerah Otonom Baru (DOB)		4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	4 Rekomen dasi Kebijakan	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
1259.PBL.002 - Rekomendasi model ideal penataan daerah dalam rangka revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014		-	1 Rekomen dasi Kebijakan	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	1.000,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.250,00	-	-
1259.PBL.003 - Rekomendasi kebijakan		-	4 Rekomen	4 Rekomen	4 Rekomen	4 Rekomen	-	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
terkait Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)			dasi Kebijakan	dasi Kebijakan	dasi Kebijakan	dasi Kebijakan															
1259.UBA.001 - Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kapasitas dan kinerja daerah bersifat kekhususan dan keistimewaan		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	6.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
1261.UBA.001 - Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		5 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	12 Daerah (Prov/Kab /Kota)	13 Daerah (Prov/Kab /Kota)	14 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2.478,27	6.433,68	3.122,05	3.122,55	3.123,05	-	-	-	-	-	2.478,27	6.433,68	3.122,05	3.122,55	3.123,05
1261.UBA.002 - Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		30 Daerah (Prov/Kab /Kota)	60 Daerah (Prov/Kab /Kota)	75 Daerah (Prov/Kab /Kota)	90 Daerah (Prov/Kab /Kota)	105 Daerah (Prov/Kab /Kota)	251,99	1.255,61	753,00	753,50	754,00	-	-	-	-	-	251,99	1.255,61	753,00	753,50	754,00
1268.QAB.001 - Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan berbasis NIK nasional		1300 Lembaga	1375 Lembaga	1450 Lembaga	1530 Lembaga	1610 Lembaga	12.902,17	14.852,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	12.902,17	14.852,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
1268.QMA.001 - Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati		-	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	-	703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	703,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1268.UBA.001 - Fasilitasi pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar Lembaga		-	45 Daerah (Prov/Kab/ Kota)	50 Daerah (Prov/Kab /Kota)	55 Daerah (Prov/Kab /Kota)	60 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.311,30	2.550,00	2.576,00	2.602,00	-	-	-	-	-	-	1.311,30	2.550,00	2.576,00	2.602,00
1269.PBM.001 - Rekomendasi		-	1 Rekomen	1 Rekomen	1 Rekomen	1 Rekomen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
kebijakan masukan Revisi Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			dasi Kebijakan	dasi Kebijakan	dasi Kebijakan	dasi Kebijakan															
1269.QAA.001 - Akta kelahiran yang diterbitkan		550.000 Akta	745.000 Akta	823.265 Akta	901.530 Akta	979.795 Akta	1.100,00	546,50	1.320,00	1.500,00	1.600,00	-	-	-	-	-	1.100,00	546,50	1.320,00	1.500,00	1.600,00
1269.QAA.002 - Akta kematian yang diterbitkan		400.000 Akta	425.000 Akta	450.000 Akta	475.000 Akta	500.000 Akta	600,00	224,00	680,00	700,00	800,00	-	-	-	-	-	600,00	224,00	680,00	700,00	800,00
1269.QAA.003 - Akta perkawinan yang diterbitkan		35.000 Akta	1.360.36 4 Akta	1.360.36 4 Akta	1.360.36 4 Akta	1.360.36 4 Akta	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1269.QAA.004 - Akta perceraian yang diterbitkan		4.500 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	50.487 Akta	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	-	-	-	-	-	832,00	315,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
1269.UBA.001 - Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif		-	15 Daerah Prov/Kab/ Kota)	15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	25 Daerah (Prov/Kab /Kota)	30 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	969,78	950,00	1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	969,78	950,00	1.500,00	2.000,00
1271.UBA.001 - Fasilitasi pembentukan data kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang terintegrasi antar lembaga		40 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
1271.UBA.002 - Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif		15 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	-	923,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,60	-	-	-	-
1276.UBA.001 - Daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi daerah/sukuk daerah		110 Daerah	220 Daerah	330 Daerah	440 Daerah	546 Daerah	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1276.UBA.002 - Daerah yang difasilitasi dalam memanfaatkan pinjaman daerah		110 Daerah	220 Daerah	330 Daerah	440 Daerah	546 Daerah	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1283.UBA.001 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan pilot project inovasi tematik		2 Wilayah Metropolitan	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.500,00	2.000,00	5.500,00	7.700,00	7.800,00	-	-	-	-	-	1.500,00	2.000,00	5.500,00	7.700,00	7.800,00
1283.UBA.002 - Daerah yang difasilitasi dalam penguatan inovasi Pemerintahan Dalam Negeri		530 Daerah	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.690,00	2.250,00	4.500,00	6.700,00	6.800,00	-	-	-	-	-	1.690,00	2.250,00	4.500,00	6.700,00	6.800,00
1285.PBL.001 - Rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri berdasarkan kapasitas daerah bidang sumber daya manusia aparatur		-	8 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	11 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1285.PFA.001 - Standarisasi perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri		-	19 NSPK	19 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	-	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
3991.PBL.001 - Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
3991.QMA.001 - Database peraturan daerah yang terintegrasi		1 Data	1 Data	1 Data	-	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
3991.UBA.001 - Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	-	-	-	-	-	2.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
3991.UBA.002 - Daerah yang memiliki		10 Daerah	17 Daerah	20 Daerah	25 Daerah	30 Daerah	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
skor indeks kepatuhan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) berkategori "Sangat Baik"		(Prov/Kab /Kota)	(Prov/Kab /Kota)	(Prov/Kab /Kota)	(Prov/Kab /Kota)	(Prov/Kab /Kota)															
4255.QAB.001 - Layanan penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	76 Lembaga	3.000,00	6.837,61	7.179,49	7.538,46	7.915,38	-	-	-	-	-	3.000,00	6.837,61	7.179,49	7.538,46	7.915,38
4255.QAH.001 - Layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	49.019,23	44.188,10	46.397,50	48.717,37	51.153,24	-	-	-	-	-	49.019,23	44.188,10	46.397,50	48.717,37	51.153,24
6085.UAB.001 - Optimalisasi penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah		-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	47.057,07	51.762,78	56.939,06	62.632,96	-	-	-	-	-	-	47.057,07	51.762,78	56.939,06	62.632,96
6136.UAB.001 - Sistem informasi pemerintahan bidang administrasi kewilayahan dalam mendukung satu data indonesia - bidang trantibumlinmas		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	100,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6136.UBA.001 - Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana berdasarkan tipologi daerah		273 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	3.200,00	10.000,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30	-	-	-	-	-	3.200,00	10.000,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30
6136.UBA.002 - Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran berdasarkan tipologi daerah		273 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	3.000,00	54.550,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30	-	-	-	-	-	3.000,00	54.550,00	24.630,00	35.993,00	51.892,30
6136.UBA.003 - Daerah yang menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan		273 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	7.750,00	22.936,78	24.630,00	35.993,00	51.892,30	-	-	-	-	-	7.750,00	22.936,78	24.630,00	35.993,00	51.892,30

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
trantibum berdasarkan tipologi daerah																					
6136.UBA.004 - Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana		3 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6136.UBA.005 - Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana		3 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6138.QDB.001 - Fasilitasi lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Pelaksanaan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)		1.500 Lembaga	9.500 Lembaga	2.000 Lembaga	2.250 Lembaga	2.500 Lembaga	2.500,00	13.000,0 0	3.500,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00	13.000,0 0	3.500,00	3.500,00	4.000,00
6139.PBL.001 - Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib pelayanan dasar		6 Rekomen dasi	6 Rekomen dasi	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	-	-
6139.PBL.002 - Rekomendasi ketepatan pembagian urusan wajib non- pelayanan dasar		8 Rekomen dasi	10 Rekomen dasi	-	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-
6139.PBL.003 - Rekomendasi ketepatan pembagian urusan pilihan		8 Rekomen dasi	8 Rekomen dasi	-	-	-	5.600,00	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600,00	3.200,00	-	-	-
6139.UBA.001 - Daerah yang melaksanakan peningkatan mutu dan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.000,00	5.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	5.700,00	-	-	-
6139.UBA.002 - Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	1.250,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	1.000,00	-	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Standar Pelayanan Minimal (SPM)																					
6139.UBA.003 - Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.004 - Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.005 - Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis		-	38 Daerah Prov/Kab/ Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
6139.UBA.006 - Provinsi yang melaksanakan peningkatan mutu dan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.500,00	4.000,00
6139.UBA.007 - Provinsi yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	2.250,00	2.750,00	3.250,00	-	-	-	-	-	-	-	2.250,00	2.750,00	3.250,00
6139.UBA.100 - Daerah yang dievaluasi rancangan Perda tata ruangnya		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	43 Daerah (Prov/Kab /Kota)	45 Daerah (Prov/Kab /Kota)	48 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.101 - Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	650,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	-	-	-	-	-	650,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
6139.UBA.200 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah																					
6139.UBA.201 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-
6139.UBA.202 - Daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		6 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	9 Daerah (Prov/Kab /Kota)	9 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.203 - Fasilitas penguatan kapasitas pemda dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang jalan		18 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
6139.UBA.204 - Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
6139.UBA.205 - Penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	1.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
6139.UBA.206 - Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.207 - Provinsi yang difasilitasi dalam		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah																					
6139.UBA.208 - Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.209 - Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.300 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-
6139.UBA.301 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-
6139.UBA.302 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Daerah																					
6139.UBA.303 - Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata		1 Daerah (Prov/Kab /Kota)	3 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	700,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	700,00	1.500,00	1.700,00	2.000,00	3.000,00
6139.UBA.304 - Daerah yang difasilitasi dalam penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
6139.UBA.305 - Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah		54 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
6139.UBA.306 - Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.307 - Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.308 - Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.309 - Kab/Kota yang		-	-	508 Daerah	508 Daerah	508 Daerah	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah				(Kab/Kota)	(Kab/Kota)	(Kab/Kota)															
6139.UBA.310 - Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.311 - Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Trantubumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6139.UBA.400 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah		546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	1.000,00	-	-	-
6139.UBA.401 - Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi		11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	11 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.403 - Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.404 - Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
gender (PPRG)																					
6139.UBA.405 - Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.406 - Daerah yang difasilitasi dalam penerapan rencana induk urusan pemuda dan olahraga		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.407 - Daerah yang menetapkan upah minimum provinsi		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6139.UBA.408 - Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan budaya gemar membaca		38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	800,00	1.000,00	1.800,00	2.300,00	2.800,00	-	-	-	-	-	800,00	1.000,00	1.800,00	2.300,00	2.800,00
6139.UBA.409 - Daerah yang di fasilitasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)		10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	18 Daerah (Prov/Kab /Kota)	26 Daerah (Prov/Kab /Kota)	33 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	175,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	175,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
6139.UBA.410 - Daerah yang difasilitasi dalam tata kelola program tiga juta rumah		-	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
6139.UBA.411 - Provinsi yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan		-	-	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	38 Daerah (Provinsi)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
berdasarkan Tipologi Daerah																					
6139.UBA.412 - Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah		-	-	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	508 Daerah (Kab/Kota)	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	-	1.750,00	2.000,00	2.250,00
6140.PBL.001 - Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dalam rangka revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-
6140.PBL.002 - Rekomendasi kebijakan masukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6140.PBL.003 - Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		-	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-
6140.PBL.004 - Rekomendasi model ideal perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2.000,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	1.250,00	-	-
6140.UBA.001 - Evaluasi efektivitas perangkat daerah		6 Daerah (Prov/Kab)	38 Daerah (11 Provinsi +	92 Daerah (20 Provinsi +	146 Daerah (29 Provinsi +	190 Daerah (38	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00	-	-	-	-	-	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) perangkat daerah eksisting		/Kota)	27 Kab/Kota)	72 Kab/Kota)	117 Kab/Kota)	Provinsi + 152 Kab/Kota)															
6141.PBL.001. - Rekomendasi pengelolaan keuangan daerah sebagai masukan revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-
6141.QMA.001 - Peta jalan belanja pegawai di daerah		1 Data	1 Data	1 Data	-	-	1.000,00	5.100,00	5.110,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	5.100,00	5.110,00	-	-
6141.QMA.002 - Basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	2.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-	-	-	-	2.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6141.UBA.011 - Provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik		19 Provinsi	29 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	1.000,00	6.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10	-	-	-	-	-	1.000,00	6.100,00	1.210,00	1.331,00	1.464,10
6141.UBA.012 - Daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat		300 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-
6141.UBA.013 - Daerah yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)		2 Daerah (Prov/Kab /Kota)	4 Daerah (Prov/Kab /Kota)	6 Daerah (Prov/Kab /Kota)	8 Daerah (Prov/Kab /Kota)	10 Daerah (Prov/Kab /Kota)	1.500,00	2.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	-	-	-	-	-	1.500,00	2.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
6141.UBA.014 - Daerah dengan proporsi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah meningkat dalam APBD		300 Daerah (Prov/Kab /Kota)	360 Daerah (Prov/Kab /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	3.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	3.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6141.UBA.015 - Daerah yang melakukan penatausahaan dan pemanfaatan barang		500 Daerah (Prov/Kab /Kota)	510 Daerah (Prov/Kab /Kota)	520 Daerah (Prov/Kab /Kota)	530 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	3.300,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	-	-	-	-	-	3.300,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
milik daerah secara wajar																					
6141.UBA.016 - Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai		110 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
6141.UBA.017 - Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai atas pengeluaran daerah		-	220 Daerah (Prov/Kab /Kota)	330 Daerah (Prov/Kab /Kota)	440 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	3.825,00	907,50	998,25	1.098,08	-	-	-	-	-	-	3.825,00	907,50	998,25	1.098,08
6141.UBA.018 - Daerah yang difasilitasi dalam rangka penerapan cashless/transaksi non tunai atas penerimaan daerah		-	220 Daerah (Prov/Kab /Kota)	330 Daerah (Prov/Kab /Kota)	440 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	-	-	-	-	-	-	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
6141.UBA.019 - Daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat		-	360 Daerah (Prov/Kab /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50	-	-	-	-	-	-	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.320,50
6141.UBA.020 - Daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat		-	360 Daerah (Prov/Kab /Kota)	420 Daerah (Prov/Kab /Kota)	480 Daerah (Prov/Kab /Kota)	546 Daerah (Prov/Kab /Kota)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6141.UBA.021 - Daerah yang menerbitkan obligasi/sukuk daerah		-	-	-	-	1 Daerah	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
6142.UBA.001 - Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"		-	3 Provinsi	5 Provinsi	7 Provinsi	10 Provinsi	-	1.865,00	3.050,00	4.100,00	4.150,00	-	-	-	-	-	-	1.865,00	3.050,00	4.100,00	4.150,00
6144.UAC.001 - Kepala Daerah (KDH)		1092 Orang	-	-	-	-	10.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.350,00	-	-	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) yang mengikuti orientasi																					
6144.UAC.002 - Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM)		360 Orang	390 Orang	390 Orang	390 Orang	390 Orang	520,61	1.024,35	1.024,35	1.024,35	1.024,35	-	-	-	-	-	520,61	1.024,35	1.024,35	1.024,35	1.024,35
6144.UAC.003 - Camat yang mengikuti pengembangan kompetensi manajemen strategi pembangunan		-	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	-	1.301,53	1.301,53	1.301,53	1.301,53	-	-	-	-	-	-	1.301,53	1.301,53	1.301,53	1.301,53
6144.UAC.004 - Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah		120 Orang	570 Orang	600 Orang	630 Orang	660 Orang	1.258,26	2.266,62	2.345,42	2.424,22	2.503,01	-	-	-	-	-	1.258,26	2.266,62	2.345,42	2.424,22	2.503,01
6144.UAC.005 - Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)		30 Orang	210 Orang	240 Orang	270 Orang	300 Orang	216,92	551,57	630,37	709,17	787,97	-	-	-	-	-	216,92	551,57	630,37	709,17	787,97
6144.UAC.007 - Pejabat fungsional penata perizinan yang mengikuti pengembangan kompetensi		60 Orang	210 Orang	240 Orang	270 Orang	300 Orang	857,75	1.020,99	1.099,78	1.178,58	1.257,38	-	-	-	-	-	857,75	1.020,99	1.099,78	1.178,58	1.257,38
6145.PBC.001 - Kebijakan bidang politik dalam negeri		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6145.PBC.002 - Kebijakan bidang organisasi kemasyarakatan		-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
6145.PBC.003 - Rekomendasi kebijakan pertimbangan urgensi terhadap dana abadi organisasi kemasyarakatan		-	1 Rekomen dasi Kebijakan	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-
6145.PEB.001 - Pengembangan literasi politik masyarakat		6 Forum	20 Forum	8 Forum	8 Forum	8 Forum	900,00	4.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	900,00	4.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6145.QDB.001 - Fasilitasi penguatan tata kelola partai politik		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	400,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	400,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
6145.QDC.001 - Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus partai politik		400 Orang	1000 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	600,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00	-	-	-	-	-	600,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.700,00
6145.QDC.002 - Peningkatan kapasitas tata kelola manajemen pengurus organisasi kemasyarakatan (Bimbingan teknis)		2000 Orang	3450 Orang	3000 Orang	3500 Orang	4000 Orang	2.000,00	4.750,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	4.750,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
6145.QEI.001 - Bantuan keuangan ke partai politik		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13	-	-	-	-	-	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13	134.489, 13
6145.UBA.001 - Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah		19 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	38 Daerah (Prov/Kab /Kota)	500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6145.UBA.002 - Fasilitasi penguatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi		19 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	38 Provinsi	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6997.PAD.001 - Peraturan Presiden mengenai identitas kependudukan digital		-	1 PerPres	-	-	-	-	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00	-	-	-
6997.UAB.001 - Aplikasi ID digital		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	-	-	153.847,0 0	58.936,82	3.008,00	-	-	-	-	-	-	-	153.847,0 0	58.936,82	3.008,00	-	-

c. MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
I.	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden				
1.	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	Untuk melindungi hak-hak orang asli papua yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup umat beragama. Majelis Rakyat Papua perlu meningkatkan kinerja melalui penguatan kelembagaan.	Ditjen Otda	Kemenkopolkam , Kemenkum, Kemensetneg, Internal Kemendagri serta melibatkan Majelis Rakyat Papua	2026
2.	Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Aglomerasi	Melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Ditjen Otda	Kementerian PPN/Bappenas	2025
3.	Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara Dari Buranga Kecamatan Bonegunu ke Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta berkepastian hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemindahan ibu kota	Ditjen Bina Adwil		2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten Buton Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah			
4.	Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital	• Untuk menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi informasi dan masyarakat, pelayanan publik termasuk pelayanan Administrasi Kependudukan yang didukung dengan sistem digital dilakukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital yang memuat identitas diri Penduduk secara digital. • Identitas diri yang mencatumkan Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Ditjen Dukcapil	Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian PPN/Bappenas.	2026
5.	Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi dan Tata Cara Penunjukan Dewan Kawasan Aglomerasi	Melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan Tata Cara Penunjukannya diatur dengan Peraturan Presiden.	Ditjen Otda	Kementerian PPN/Bappenas	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
II.	Peraturan Menteri Dalam Negeri				
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029	- Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga perlu menyiapkan rancangan rencana strategis kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. - Rencana Strategis kementerian/lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap kementerian/lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi kementerian/lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. - Mengingat Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 telah selesai pada tahun 2024, dibutuhkan Rencana Strategis baru untuk Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Kementerian PPN/Bappenas.	Biro Perencanaan	Seluruh UKE I Kemendagri	2025
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2026	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun	Biro Perencanaan	- Itjen - Ditjen Bina Adwil	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2027	2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan melalui mekanisme Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri. • Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri setiap Tahun Perencanaan Anggaran untuk mengakomodir perubahan terkait Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada GWPP		•Ditjen Bina Bangda •Ditjen Otda •Ditjen Polpum	2026
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2028				2027
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2029				2028
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2030				2029
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Peraturan Presiden Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	Bahwa semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan sebagai bentuk tindaklanjut dari Perpres tersebut yang akan digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah	Ditjen Otda		2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Regulasi Tahunan	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	Kementerian dan Lembaga	Tahunan (2025-2029)
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	Regulasi Tahunan	Direktorat Pendapatan Daerah	Kementerian dan Lembaga	Tahunan (2025-2029)
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Regulasi Tahunan	Ditjen Bina Bangda		Tahunan (2025-2029)
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat BSKDN	•BRIN •LAN	2025
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perubahan instrumen penilaian	Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	•Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri •Kementerian Keuangan	2025
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri	•Belum diaturnya ketentuan tentang penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN)	Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan,	•Biro Perencanaan •Kementerian	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
		•Direncanakan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) akan menjadi IKU Kemendagri	dan Pelayanan Publik	PPN/ Bappenas	
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan	• Menyesuaikan UU PDP tahun 2022 terkait Pelindungan Data Pribadi dan keamanan informasi maka Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 ini harus dilakukan revisi. • Menyesuaikan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Permendagri 57 Tahun 2021 ini harus dilakukan revisi. • menyesuaikan terhadap persyaratan kontrol dan keamanan informasi ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022, apabila tidak lakukan perubahan Permendagri tersebut menjadi tidak relevan terhadap keamanan informasi saat ini.	Ditjen Dukcapil		2027
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	• untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang optimal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi • Reformasi birokrasi nasional saat ini menekankan de-Eselonisasi struktural dan pergeseran ke jabatan fungsional untuk meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas layanan publik. Kementerian PANRB bahkan menerbitkan PermenPANRB	Ditjen Dukcapil		2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
		No.2/2023 tentang organisasi UPT guna menyesuaikan diri dengan “kebijakan penyederhanaan birokrasi yang berbasis fungsional”. • Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 masih memuat nomenklatur struktural lama (misalnya jabatan sub-koordinator setingkat Eselon IV), yang kini tidak sejalan dengan kebijakan nasional penghapusan jabatan Eselon IV dan penekanan kompetensi jabatan fungsional. • Regulasi yang lama belum mengakomodasi penghapusan jabatan Eselon IV dan transisi penuh ke jabatan fungsional, sehingga berpotensi menjadi kendala hukum dalam penyusunan SOTK OPD Dukcapil pasca-reformasi. Menyelaraskan pedoman nomenklatur Disdukcapil dengan kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong efektivitas organisasi, serta meningkatkan kinerja layanan Dukcapil kepada masyarakat. Dengan demikian, revisi itu bukan hanya menyesuaikan regulasi, tetapi juga menjamin bahwa transformasi struktural mampu memperbaiki kualitas pelayanan Adminduk sesuai tujuan reformasi birokrasi.			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.		Ditjen Dukcapil		2027
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.	• Sejak diterbitkan Permendagri ini belum dilakukan uji teknis untuk perangkat keras perekaman KTP-el. • Sesuai dengan surat BRIN Nomor: B-3165/III.6/KS.00/4/2024 tanggal 16 Maret 2024 tentang Penyampaian Pelaksanaan Uji Teknis Perangkat disebutkan bahwa BRIN bekerjasama dengan Sucofindo dalam melakukan pengujian teknis perangkat. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa terdapat beberapa parameter yang tidak dapat diuji oleh pihak ketiga. • Standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak SAK, Pengujian pada perangkat, Penyelenggaraan IKD.	Ditjen Dukcapil		2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN